VOLUME 2 No. 1 (2024)

JPWP

JURNAL PERENCANAAN WILAYAH DAN PEMBANGUNAN

Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

(Erlina Dwi Rahmawati, Teguh Hadi Priyono, Endah Kurnia Lestari, Fajar Wahyu Prianto , Duwi Yunitasari, Akhmad Munir)

Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

(Febiyanti Utami, Teguh Hadi Priyono, Nanik Istiyani, Musa Al Kadzim, Okyviandi Putra Erlangga, Suparman, Anifatul Hanim)

Dampak Positif dan Negatif Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)

(Adit Abil Faturahman, Ariel Muhammad Syahril Mubarok, Ilham Marta, Roja Fauzi, Muhammad Andi Septian)

Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Kopi di Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

(Nabila Athesa Angie, Aisah Jumiati, Edy Santoso, M. Abd. Nasir, Robby Reza Zulfikri, Siti Komariyah)

Analisis Kemiskinan Jawa Timur

(Husniatul Hoiroh, Aisah Jumiati, Teguh Hadi Priyono, Moh. Adenan, Lilis Yuliati, Ciplis Gema Qori'ah)

Pengaruh PDRB, Investasi, dan Aglomerasi terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur

(Musyrifah, Edy Santoso, Zainuri, Inayah Swasti Ratih, Abdul Fatah, Bahrina Almas)

Peran Home Industry dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Home Industry Kerupuk Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan)

(Lailatul Munawwaroh, Mohammad Saleh, Sebastiana Viphindrartin, Umi Cholifah, Agus Mahardiyanto, Sjafruddin)

Analisis Permintaan Tenaga Kerja pada Sektor Industri di Pulau Jawa Periode Tahun 2012-2022

(Bintang Putri Artha, Fivien Muslihatinningsih, Teguh Hadi Priyono, Riniati, Lusiana Ulfa Hardinawati, Yulia Indrawati, Agus Luthfi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER

EDITORIAL TEAM

1.	Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.	Penanggung Jawab
2.	Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si.	Redaktur
3.	Dr. Edy Santoso, S.E., M.Sc	Editor
4.	Dr. Rafael Purtomo Somaji, M.Si.	Editor
5.	Musa Al Kadzim, S.Ag., M.Ag.	Editor
6.	Okyviandi Putra Erlangga, S.EI., M.SEI.	Editor

DAFTAR ISI

VOLUME 2 No. 1 (2024)

Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia **1-8**
(Erlina Dwi Rahmawati, Teguh Hadi Priyono, Endah Kurnia Lestari, Fajar Wahyu Prianto , Duwi Yunitasari, Akhmad Munir)

Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur **9-16**
(Febiyanti Utami, Teguh Hadi Priyono, Nanik Istiyani, Musa Al Kadzim, Okyviandi Putra Erlangga, Suparman, Anifatul Hanim)

Dampak Positif dan Negatif Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) **17-29**
(Adit Abil Faturahman, Ariel Muhammad Syahril Mubarok, Ilham Marta, Roja Fauzi, Muhammad Andi Septian)

Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Kopi di Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember **30-39**
(Nabila Athesa Angie, Aisah Jumiati, Edy Santoso, M. Abd. Nasir, Robby Reza Zulfikri, Siti Komariyah)

Analisis Kemiskinan Jawa Timur **40-48**
(Husniatul Hoiroh, Aisah Jumiati, Teguh Hadi Priyono, Moh. Adenan, Lilis Yuliati, Ciplis Gema Qori'ah)

Pengaruh PDRB, Investasi, dan Aglomerasi terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur **49-57**
(Musyrifah, Edy Santoso, Zainuri, Inayah Swasti Ratih, Abdul Fatah, Bahrina Almas)

Peran Home Industry dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Home Industry Kerupuk Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan) **58-64**
(Lailatul Munawwaroh, Mohammad Saleh, Sebastiana Viphindrartin, Umi Cholifah, Agus Mahardiyanto, Sjafruddin)

Analisis Permintaan Tenaga Kerja pada Sektor Industri di Pulau Jawa Periode Tahun 2012-2022 **65-75**
(Bintang Putri Artha, Fivien Muslihatinningsih, Teguh Hadi Priyono, Riniati, Lusiana Ulfa Hardinawati, Yulia Indrawati, Agus Luthfi)

ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Erlina Dwi Rahmawati [a,1,*], Teguh Hadi Priyono [b,2], Endah Kurnia Lestari [c,3], Fajar Wahyu Prianto [d,4], Duwi Yunitasari [e,5], Akhmad Munir [f,6]

[a,b,c,d,e,f] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37, Jember 68121, Indonesia [1] erlinarohmawati1401@gmail.com*; [2] teguh_hadipriyo@yahoo.com ; [3] endahkurnia.feb@unej.ac.id ; [4] fajar.prianto@unej.ac.id ; [5] duwiyunita.feb@unej.ac.id ; [6] akhmadmunir@unej.ac.id
*Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history
Received January 2024
Revised March 2024
Accepted May 2024

ABSTRAK

In order to achieve social welfare, development requires increased economic growth and equal distribution of income. Rapid economic growth that is not balanced with equality will create inequality between regions. This research aims to analyze the influence of Economic Growth, Population, and Average Years of Schooling (RLS) on Income Inequality in Indonesia. The data used in this research is secondary data taken from several official publications. The data source was taken from the Central Statistics Agency, with a period of 2013 to 2022. The method used in this research is quantitative using panel data regression analysis. The best model chosen for data processing in this research is the Random Effect Model. The results of the research analysis show that economic growth and education have a negative and significant effect on income inequality in Indonesia, population has a positive and significant effect on income inequality in Indonesia.

Keywords
Inequality, Economic Growth, Population, Education, Panel Data

1. Pendahuluan

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Pembangunanan adalah sebuah proses multidimensional yang mendasarkan perubahan dalam struktur sosial, dan tingkah laku sosial, di samping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, pemerataan pemberantasan kemiskinan (Todaro 2004).

Menurut Oxfam Indonesia dan *International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID). Indonesia merupakan negara dengan ketimpangan pendapatan tertinggi keenam di dunia, pada periode 2019-2020 merupakan rentang waktu yang dapat mencakup berbagai peristiwa dan faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Seperti halnya pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Seperti halnya pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Pembatasan sosial dan ekonomi yang diterapkan untuk mengatasi penyebaran virus dapat memiliki dampak yang tidak merata di berbagai sektor dan kelompok masyarakat. Faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara, pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi selama periode tersebut dapat mempengaruhi pendapatan berbagai kelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mungkin meningkatkan pendapatan, namun distribusi hasil pertumbuhan tersebut menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan.

Meskipun ketimpangan pendapatan telah menjadi isu penting di banyak negara, masih terdapat perdebatan mengenai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan. Ada yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan (Amri dan Nazamuddin, 2018). Sebaliknya, peneliti lain menentang hipotesis ini. Mereka berpendapat bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka ketimpangan pendapatan juga akan meningkat (Rubin dan Segal, 2015; Scully, 2003). Bahkan ada yang menyatakan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan bisa positif atau negatif tergantung pada sumber pertumbuhannya. Jika pertumbuhan tersebut berasal dari pertumbuhan lapangan kerja, maka hal tersebut akan menguntungkan sebagian besar rumah tangga berpendapatan rendah dan mempunyai efek pemerataan. Sebaliknya, jika pertumbuhan tersebut berasal dari produktivitas tenaga kerja, kemungkinan besar akan berdampak pada meningkatnya ketimpangan pendapatan (Hermansen et al.,2016).

Dalam akhir-akhir ini permasalahan ketimpangan menjadi titik prioritas pemerintah untuk fokus keberlangsungan dan ketahanan suatu negara. Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah yaitu dalam mengurangi ketimpangan diupayakan melalui sektor padat tenaga kerja (Loayza and Raddatz, 2010). Namun untuk mencapai hal tersebut, diperlukannya pertumbuhan ekonomi untuk mendorong terbukanya lapangan kerja di berbagai bidang. Dalam proses transformasi ekonomi yang diperankan oleh sektor swasta, negara harus memainkan peran yang terbatas dalam meningkatkan persaingan, menciptakan iklim investasi dan meningkatkan inovasi di sektor swasta. Misi ini mencakup penyediaan lingkungan peraturan dan makro ekonomi yang memberikan stabilitas dan insentif bagi sektor swasta, dan investasi pada aset publik seperti infrastruktur fisik dan sumber daya manusia untuk menciptakan tenaga kerja modern.

Struktur ekonomi yang tidak merata atau sektoral dapat menciptakan ketimpangan. Beberapa sektor mungkin berkembang lebih pesat atau memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar dari pada sektor-sektor lain, menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan. Hal ini sejalan dengan pemikiran teori kuznets yang mengungkapkan bahwa adanya perbedaan struktur ekonomi antar daerah, dimana pada daerah maju sudah terkonsentrasi pada sektor industri yang memiliki produktivitas tinggi.

Namun teori tersebut dibantah oleh Teori Rawls menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling miskin. Namun, teori ini tidak selalu mudah diterapkan dalam praktik. Ada beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, tetapi justru dapat merugikan kelompok yang paling miskin. Dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu penangananan dan pengentasan mengenai ketimpangan yang terjadi di Indonesia Maka dari itu pemerintah melakukan kebijakan untuk mendorong pemerataan ekonomi seperti pemberian bantuan sosial, menurunkan angka kemiskinan dan memberikan peluang pekerjaan. Dapat dilihat dari gambar 1.1, nilai rasio gini di Indonesia mengalami fluktuasi pada tahun 2014-2022 dari 0.414 menjadi 0.381

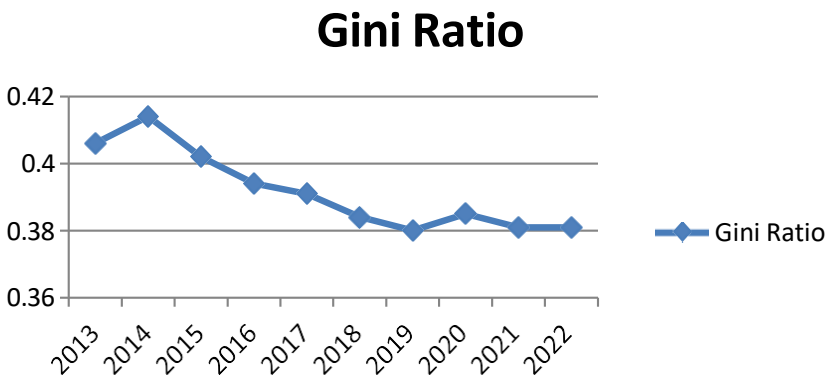

Gambar 1. Grafik Gini Ratio Tahun 2013-2022 (Persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik

2. Tinjauan Pustaka

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Telah banyak penelitian yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kejadian ketimpangan pendapatan. Salah satu studi paling awal mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dipelopori oleh Kuznets (1955), yang menggambarkan bahwa terdapat hubungan berbentuk U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan (seperti terlihat pada gambar)

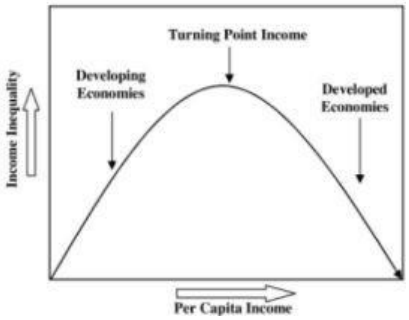

Gambar 2. Kurva Kuznets
Sumber: Simon Kuznets (1995)

Gambar tersebut mengilustrasikan bahwa ketimpangan akan meningkat pada tahap awal pertumbuhan dan pembangunan kemudian menurun di negara-negara maju. Bentuk U terbalik menunjukkan proses perekonomian yang mengalami industrialisasi. Pada awal perkembangan suatu perekonomian, peluang investasi baru meningkat bagi mereka yang telah memiliki modal untuk berinvestasi. Peluang investasi baru ini berarti bahwa mereka yang sudah memiliki kekayaan memiliki peluang untuk meningkatkan kekayaan tersebut. Sebaliknya, masuknya tenaga kerja murah

dari pedesaan ke kota membuat upah kelas pekerja tetap rendah sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesenjangan ekonomi. Namun, ketimpangan ekonomi diperkirakan akan berkurang ketika tingkat pendapatan rata-rata tertentu tercapai dan proses yang terkait dengan industrialisasi, seperti demokratisasi dan pembangunan negara kesejahteraan, dapat berjalan (Moffatt, 2019).

Selain tahapan pembangunan seperti yang dijelaskan oleh kurva Kuznets, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan juga bergantung pada kelas masyarakat mana yang paling diuntungkan dari pertumbuhan tersebut.Jika pertumbuhan hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi, maka ketimpangan akan meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan dapat meringankan kendala keuangan rumah tangga miskin, maka ketimpangan akan berkurang (Kakwani dkk., 2003). Mengikuti Teori Kuznet, terdapat beberapa penelitian penting yang mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.Beberapa ekonom berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang statis bisa saja terjadi karena ketimpangan pendapatan. Mereka beranggapan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi akan memperlambat pendapatan nasional, begitu pula sebaliknya. Menurut (Bruekner, Norris, dan Gradstein 2015), semakin besar PDB maka semakin kecil ketimpangan. Dengan menggunakan pendapatan dunia berdasarkan perdagangan dan fluktuasi harga minyak, mereka menemukan bahwa peningkatan PDB sebesar 1% akan mengurangi Koefisien Gini sebesar 0,08 poin persentase. Namun, hasil penelitian ini harus dijelaskan dengan hati-hati karena mungkin ada variabel lain yang mempengaruhi PDB dengan dampak heterogen terhadap kesetaraan.

Teori Jumlah Penduduk

Menurut teori Malthus, ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk suatu wilayah. Teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin besar pula potensi ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Peningkatan persaingan dalam memperoleh sumber daya produktif. Semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula orang yang bersaing untuk memperoleh sumber daya produktif, seperti tanah, modal, dan tenaga kerja. Teori Malthus telah didukung oleh beberapa penelitian empiris. Salah satu penelitian yang mendukung teori ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Barro (2000). Penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan.

Teori Pendidikan

Teori Human Capital Becker (1964) menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu bentuk investasi dalam diri sendiri, dimana individu memutuskan tingkat pendidikan yang akan diambil berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat becker mengaitkan kualitas (SDM) Sumber Daya Manusia dengan pendidikan formal yang ditempuh, dimana ketika masyarakat memiliki pendidikan yang baik maka akan berdampak terhadap produktivitas kerja dan keterampilan masyarakat tersebut sehingga berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan serta kotribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut bermakna jika suatu wilayah memiliki kualitas (SDM) Sumber Daya Manusia yang baik maka masyarakat akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang baik sehingga menaikkan ketimpangan pendapatan antar wilayah.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia” menggunakan Explanatory research. Data yang digunakan yaitu data panel yang merupakan penggabungan dari deret waktu (time series) dari tahun 2013 hingga 2022 dan deret lintang (cross section) sebanyak 34 provinsi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data

sekunder data yang diperoleh dari lembaga resmi Pemerintah Republik Indonesia yaitu Badan Pusat Statistik Indonesia. Data panel merupakan gabungan antara data cross section dan data time series. Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian untuk menguji pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi (*Growth*), Pendidikan (RLS), Jumlah Penduduk (JP) terhadap variabel terikat Ketimpangan Pendapatan sebagai berikut:

$$GINI = \beta0+\beta1GWHit+\beta2JPit+\beta3RLSit+\varepsilon it$$

Keterangan:

GINI	= Ketimpangan pendapatan
β0	= Konstanta
β1, β2, β3	= Koefisien Regresi Parsial
Growth	= Pertumbuhan Ekonomi
JP	= Jumlah Penduduk
RLS	= Rata-Rata Lama Sekolah
ε	= Residual/error
I	= Cross section 34 provinsi
t	= Time series (Tahun 2013-2022)

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil estimasi dari Uji Hausman, nilai probabilitas adalah sebesar 0.3448. Jika nilai probabilitas dibandingkan dengan nilai kritis atau alfa (… = 5% = 0.05), maka hasil menunjukkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, dapat disimpulkan jika model terbaik adalah Random Effect Model dibandingkan dengan Fixed Effect Model atau H0 diterima dan H1 ditolak

Tabel 1. Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	0.419933	0.021956	19.12580	0.0000
GWH	-0.025665	0.004987	-5.146719	0.0000
JP	8.9300006	3.0800006	2.895047	0.0040
RLS	-0.001941	0.003183	-0.609632	0.5425

Sumber: Olahan sendiri, Eviews 10

Hasil estimasi regresi data panel dengan Random Effect Model dapat dijelaskan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$GR = \beta_0 + \beta_1 GWHit + \beta_2 JPit + \beta_3 RLSit + \varepsilon_{it}$$

$$GR = 0.419933 + (-0.025665)\ \beta_1 GWHit + 8.9300000006\ \beta_2 JPit + (-0.001941)\ \beta_3 RLSit + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan hasil regresi data panel, koefisien dan probablitas dari masing-masing variabel memiliki hasil yang berbeda-beda. Berikut hasil dari interpretasi regresi dan analisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

a. β_0 yang merupakan nilai konstanta sebesar 0.419933 merupakan besarnya nilai ketimpangan pendapatan jika jumlah pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pendidikan bernilai konstan, bahwasannya apabila rasio pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan pendidikan sebesar 0 maka ketimpangan pendapatan sebesar 0.419933.
b. β_1 yang merupakan koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0.025665 mengartikan jika pertumbuhan ekonomi naik satu persen, maka ketimpangan pendapatan akan mengalami penenurunan sebesar 0.025665 persen. Selain itu variabel pertumbuhan ekonomi memiliki

nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari dari nilai α = 5% yang mengartikan jika pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

c. β_2 yang merupakan koefisien jumlah penduduk sebesar 8.9300000006 mengartikan jika jumlah penduduk naik satu persen, maka ketimpangan pendapatan akan mengalami kenaikan sebesar 8.9300000006 persen. Selain itu variabel jumlah penduduk memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0040 lebih kecil dari dari nilai α = 5% yang mengartikan jika jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
d. β_3 yang merupakan koefisien Pendidikan sebesar -0.001941 mengartikan jika pendidikan naik satu persen, maka ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan sebesar -0.001941 persen. Selain itu variabel pendidikan memiliki nilai probabilitas sebesar 0.5425 lebih besar dari dari nilai α = 5% yang mengartikan jika pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pembahasan

Pada tahap pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dimana pada saat pertumbuhan ekonomi disetiap wilayah meningkat maka akan mengurangi ketimpangan pada wilayah tersebut. Namun hal ini juga diikuti dengan pemerataan pendapatan masyarakat pada wilayah- wilayah tersebut dan dengan peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan, karena pembukaan lapangan pekerjaan dapat memberikan akses kepada lebih banyak orang untuk memperoleh pendapatan sehingga akan mengurangi ketimpangan. Ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata disetiap wilayah atau daerah, Semakin cepat pertumbuhan ekonomi maka semakin tidak merata pola distribusi pendapatan yang diakibatkan oleh peningkatan jumlah tabungan dan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh tingkat tabungan masyarakat kaya lebih tinggi dibandingkan masyarakat miskin.

Pada tahap pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, jika jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan, adanya penduduk di suatu negara tentu memiliki beberapa pengaruh terhadap perekonomian di suatu negara. Penduduk didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang menempati suatu daerah atau wilayah tertentu. Jumlah penduduk merupakan jumlah total dari individu atau kelompok yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu. Dalam perekonomian suatu negara, ketika jumlah penduduk mengalami peningkatan, hal tersebut tentu akan memberi pengaruh positif terhadap perekonomian negara tersebut apabila seluruh penduduk memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan. Namun fakta dalam lapangan, setiap orang memiliki pekerjaan yang beragam, dan dari pekerjaan yang beragam tersebut tentu masing-masing orang akan memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Meskipun di satu tempat kerja yang smaa, pendapatan yang dimiliki tentu akan berbeda karena posisi pekerjaan menentukan berapa pendapatan yang akan didapatkan seseorang. Semakin tinggi posisi jabatan dalam pekerjaan, maka semakin tinggi pula penghasilan yang akan didapatkan. Adanya perbedaan pendapatan tersebut yang melatar belakangi adanya ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah atau wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara rata-rata lama sekolah dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya setiap peningkatan lama sekolah tidak menyebabkan penurunan terhadap ketimpangan pendapatan. Disini dapat diindikasikan bahwa pendidikan tidak selalu mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena pendidikan akan mempengaruhi pendapatan seseorang, dimana pendapatan bisa diukur dengan pendidikan seseorang. Orang yang mendapatkan pendidikan yang tinggi, cenderung memperoleh

pendapatan yang tinggi akan tetapi orang yang tamatan perguruan tinggi banyak yang menjadi pengangguran. Penganguran terjadi karena sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini, dan pencari kerja yang cenderung menunggu untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliahnya. Pengangguran menyebabkan orang tidak memiliki pendapatan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, Jumlah Penduduk yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Adipuryanti, N. P. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendaatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Vol 11 No 1*, 20-28.

Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Desentralisasi di Indonesia. *Vol .20, No.1*, 53-68.

Andina, R. D., Jajang, & Supriyanto. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmiah Matematika Dan Pendidikan, Vol.13 No.1*, 1-14.

Ariusni, D. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Penaptan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Vol 1 No 3*, 495-502.

Didia, K. A. (2016). Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Kawasan Kedungsepur. *Economics Developments Analysis Journal*, 101-108.

Fernando, D., & Amar, S. (2021). Hubungan Kausalitas Antara Ketimpangan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembagunan, Vol.3. No.2*, 43-52.

Hidayat, M. H. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2012. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Universitas Diponegoro*, 1-64.

Hindun, Soejoto, A., & Hariyati. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol.8, No.3*, 250-265.

Khuluk, D. K., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2019). Analisis Disparitas Pendapatan Antar Wilayah Di Daerah Penyangga Surabaya. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.7, No.1*, 9-24.

Kumenengan, R. M., & Dkk. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota Di Boolang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.23 No.3*, 133-144.

Muharam, K. I. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2020. *Journal Of Development Economic And Social Studies, Vol 1 No 2*, 284-294.

Nurhuda, R., Muluk, M. K., & Prasetyo, Y. W. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.4*, 110-119.

Oksamulya, A., & Anis, A. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, Vol.2, No.2*, 19-24.

Statistik, B. P. (2017-2021). Retrieved From Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi Dan Daerah: Https://Www.Bps.Go.Id/Subject/23/Kemiskinan- Dan-Ketimpangan.Html#Subjekviewtab3

Statistik, B. P. (N.D.). *Pdrb Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (2010=100) (Juta Rupiah)*. Retrieved From 2017-2021: Https://Www.Bps.Go.Id/Subject/171/Produk-Domestik-Regional-Bruto--Pengeluaran-.Html#Subjekviewtab3

Statistik, B. P. (N.D.). *Rasio Gini*. Retrieved From 2017-2021: Https://Www.Bps.Go.Id/Subject/23/Kemiskinan-Dan- Ketimpangan.Html#Subjekviewtab3

Statistik, B. P. (N.D.). *Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi*. Retrieved From 2017-2021: Https://Www.Bps.Go.Id/Subject/28/Pendidikan.Html#Subjekviewtab3

Subrata, B. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah*, 1-12.

Syaparuddin, I., & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan (Studi Provinsi-Provinsi Di Indonesia). *E-Jurna Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan, Vol.7. No.3*, 111-126.

Taharah, S. (Yogyakarta: Fakultas Ekoomi Universitas Islam Indonesia). Ketimpangan Dsitribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*.

Tiara, S. (2013). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Propinsi Sumatera Utara. *Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara*, 1-16.

Wardhana, A., Kharisma, B., & Fauzy, M. Z. (2023). Determinan Ketimpangan Pendidikan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, Vol .21 No.1*, 101-111.

Yogyakarta, B. D. (2020). Analisis Keimpangan Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pp. 1-115

Yuliani, T. (2015). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Kalimantan Timur. *Journal Of Economics and Policy, Vol.8 No.1*, 1-88.

ANALISIS DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA TIMUR

Febiyanti Utami [a,1,*], Teguh Hadi Priyono [b,2], Nanik Istiyani [c,3], Musa Al Kadzim [d,4], Okyviandi Putra Erlangga [e,5], Suparman [e,5], Anifatul Hanim [e,5]

[a b c d e] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37, Jember 68121, Indonesia
[1] febiyantiutami47@gmail.com *; [2] teguh_hadipriyono@yahoo.com ; [3] nanik.istiyani01@gmail.com ; [4] musa.alkadzim@mail.unej.ac.id ; [5] okyviandi.feb@unej.ac.id ; [6] s_uparman@yahoo.co.id ; [7] hanim.feb@unej.ac.id
* Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history
Received May 2024
Revised May 2024
Accepted May 2024

ABSTRACT

Economic growth is one of the familiar indicators used in determining the success of a development. Economic growth is used as a measure of the development or economic progress of a country or region because it is related to economic activity. Economic development cannot be measured only from increased economic growth but needs to be seen from social factors. This study aims to determine the effect of economic growth as an economic indicator of development. This research is a type of quantitative approach descriptive research. The data used is secondary data with panel data types using regression analysis. The results of this study show that the variable Number of Industries has a significant effect on Economic Growth in East Java Districts/cities. The Labor Force Participation Rate has a positive insignificant effect on Economic Growth in East Java Districts/cities. The Human Development Index has a significant positive effect on Economic Growth in East Java Districts/Cities.

Keywords
Economic Growth, Number of Industries, Labor Force Participation Rate, Human Development Index

1. Pendahuluan

Salah satu penunjang yang dapat mengidentifikasi suatu pembangunan yang dapat dikatakan berhasil ialah Pertumbuhan Ekonomi. Salah satu tolak ukur perkembangan serta kemajuan perekonomian dilihat dari Pertumbuhan suatu wilayah negara karena terkait dengan aktivitas-aktivitas ekonomi dalam menaikkan produksi jasa dan barang (Mirah, 2020). pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat belom bisa dikatakan bahwa dapat memperbaiki pembangunan ekonomi melainkan juga dilihat dari faktor-faktor sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Jika tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari sebelumnya, perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan. Pemerintah selalu berusaha untuk mencapai tingkat ekonomi yang diinginkan melalui berbagai kebijakan (Lubis, 2013).

Dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto begitu cukup ekonomi nasional dapat tercapai. Namun, pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai industri. kondisi pandemi menyebabkan perekonomian dunia bahkan seluruhnya juga Indonesia karena hal itu berdampak pada bagian pengeluaran pemerintah selama pandemi. Peningkatan pengeluaran pemerintah menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan permintaan serapan pekerja, pembangunan ekonomi yang berpusat pada industrialisasi meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan (Sabilla & Sumarsono, 2022). Perindustrian Indonesia adalah salah satu bagian penting dari perekonomian, dan peningkatan industri di pasar domestik dan global yang menyebabkan persaingan lebih besar. Perindustrian mengubah struktur ekonomi negara dengan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan lebih baik. Dengan lebih dari 6000 perusahaan yang berkembang di Jawa Timur (BPS, 2022), dan Surabaya sebagai pusat perdagangan utama di wilayah ini, pasti akan ada banyak industri yang mulai berkembang di kota ini. Industri-industri besar ini harus siap memenuhi permintaan pasar di Jawa Timur (Julianto, 2016).

Tenaga kerja memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas perusahaan karena Perusahaan tidak dapat mengoptimalkan keuntungan mereka karena mencakup ruang gerak masyarakat. Namun kondisi Pandemi COVID-19 juga menyebabkan pemutusan hubungan kerja, yang berdampak pada penurunan pendapatan pekerja, dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang luas, investasi yang lebih besar dapat meningkatkan penyerapan energi tenaga kerja (Kusuma 2015). Dalam memacu kondisi pertumbuhan ekonomi perlu adanya peningkatan dalam pembangunan Peningkatan kualitas modal manusia akan menyebabkan peningkatan produktivitas, yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian, meningkatkan kemajuan suatu wilayah. Tujuan pembangunan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kemampuan dasar manusia yang diperlukan untuk meningkatkan peluang orang untuk berkontribusi (Latiffa, 2017). ketertarikan pemilihan penelitian pada Jawa Timur dilihat dari letak yang srategis dalam kondisi sosial maupun bidang industri dan juga Peningkatan ketersediaan dserta pemerataan kebutuhan untuk rakyat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengakomodasi perubahan yang disebabkan oleh pembangunan.

Pertumbuhan Ekonomi turun jika dilihat dari Jumlah industri pada tahun 2020 karena menurunnya konsumsi dan permintaan kondisi ekonomi yang tidak pasti selama pandemi baik dipasar lokal maupun internasional serta ketidakstabilan keuangan bagi perusahaan- perusahaan untuk mengembangkan usaha atau melakukan investasi baru, selain itu faktor lain jika dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja disebabkan oleh penurunan penawaran pekerjaan terutama di sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, perdagangan serta manufaktur sehingga dapat berkurangnya peluang kerja baru dan dari faktor indeks pembangunan manusia penurunan terjadi disebabkan oleh penghasilan dan pekerjaan karena pembatasan sosial dan ekonomi mengakibatkan penurunan pendapatan dan

hilangnya pekerjaan yang mempengaruhi akses mereka terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan

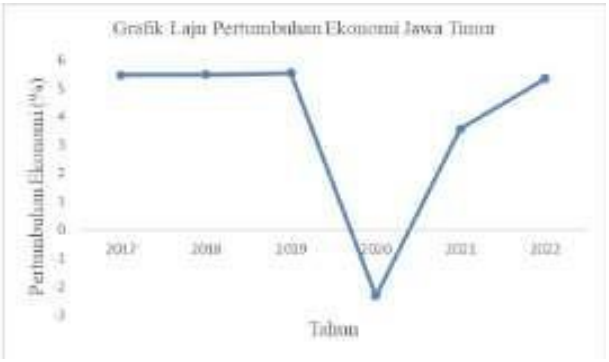

standar hidup yang layak.

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2022 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik

.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori endogenous yang dikenal sebagai teori endogen agar bertujuan menemukan dan menganalisis komponen komponen yang mempengaruhi pertumbuhan dalam Sistem Ekonomi itu sendiri (Arsyad, 2016). Sebuah organisasi ekonomi memiliki kemampuan untuk meningkatkan efektivitasnya dengan memanfaatkan sumber daya produktifnya secara bertahap. Belajar dan inovasi adalah sumber dari banyak kemampuan tersebut. Pengembangan pengetahuan ekonomi bernilai tambah tinggi memiliki kemampuan untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam sektor-sektor yang berkembang pesat di ekonomi global. Menurut Teori Pertumbuhan Endogen, Pengembangan pengetahuan ekonomi bernilai tambah tinggi memungkinkan membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam sektor-sektor yang berkembang pesat di ekonomi global (Nuraini, 2017).

Teori Jumlah Industri

Maghfur Wachid melihat industri sebagai milik individu Karena industri adalah aset yang dapat dimiliki oleh individu. industri suatu unit terletak di tempat-tempat yang memang mempunyai kegiatan tersebut, seperti mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih besar mengubah barang yang tidak bernilai menjadi barang yang bernilai berdasarkan tenaga kerja. Industri terbagi menjadi empat kategori: Industri Besar, Industri Kecil, Industri Sedang, dan Industri Menengah, serta Industri Rumah Tangga. Hubungan antara Industri-Industri dan pertumbuhan ekonomi adalah bahwa jumlah industri dan pertumbuhan ekonomi dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, jenis industri, dan tingkat teknologi. Selain itu, industri manufaktur di Indonesia menjadi penopang utama perekonomian serta menyumbang paling besar terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Industri ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan inovasi dan produktivitas.

Teori Populasi

Neoklasik Solow-Swan muncul di pada 1950-an. Menurut teori Pertumbuhan Neoklasik Solow, pengembangan dan penambahan faktor di pengaruhi oleh penawaran agregat mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi. Perkembangan faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi adalah beberapa contoh faktor produksi yang berkembang. Teori pertumbuhan neoklasik Solow, yang disebut sebagai "model pertumbuhan "eksogen", menyatakan

bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan kemajuan teknologi, tenaga kerja dan peningkatan modal. Dalam teorinya, selalu ada tiga elemen yang berkontribusi pada peningkatan output. Di antaranya adalah penambahan modal (melalui tabungan dan pertumbuhan penduduk), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja (melalui peningkatan pendidikan dan pertumbuhan penduduk).

Teori Kualitas Penduduk

Gary Becker mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia terdapat beberapa unsur yaitu, pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan yang memadai. Indeks yang meningkat juga menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik, yang ditandai dengan tubuh yang sehat dan umur panjang. Salah satu cara untuk mencapai pembangunan ekonomi adalah melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Sumber daya manusia berkualitas tinggi diperlukan di kedua sektor, industri dan pertanian. Maka dari itu akan mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di masa depan. Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan manusia saling terkait erat. Indeks Pembangunan Manusia dapat menunjukkan apakah masyarakat memenuhi persyaratan pendidikan , kesehatan, dan pendapatan. Jika persyaratan ini terpenuhi, kualitas Sumber Daya Manusia juga akan signifikan. Produksi akan meningkat, dan ini akan membantu mereka mendapatkan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul "Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur" menggunakan *Explanatory Research*. Data yang digunakan yaitu data panel yang merupakan penggabungan dari deret waktu (*time series*) dari tahun 2017 hingga 2022 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 36 provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder data yang diperoleh dari lembaga resmi Pemerintah Republik Indonesia yaitu Badan Pusat Statistik Indonesia. Data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian untuk menguji pengaruh variabel Jumlah Industri (JI), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 JI_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

PE	: Pertumbuhan Ekonomi
JI	: Jumlah Industri
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
B_0	: Konstanta
β1, β2, β3	: Koefisien
i	: *Cross section*
e	: *Error term*
t	: *Time series*

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil estimasi dari Uji Hausman, nilai probabilitas adalah sebesar 0.000. Jika nilai probabilitas dibandingkan dengan nilai kritis atau alfa (… = 5% = 0.05), maka hasil menunjukkan jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, dapat disimpulkan jika model terbaik adalah Fixed Effect Model dibandingkan dengan Random Effect Model atau H0 diterima dan H1 ditolak.

Tabel 1. Hasil Regresi

Variabel Independen	Koefisien	t-statistic	Prob
C	0.819197	34.71137	0.0000
Jumlah Industri	1.52E05	2.344378	0.0202
TPAK	2.81E07	0.505506	0. 6138
IPM	0.0099569	29.498500	0.0000

Sumber: Eviews 13, 2024

Hasil estimasi regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* dapat dijelaskan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$PE = \beta_0 + \beta_1 JI_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$PE = 0.819197 + 1.52E05\ JI_{it} + 2.81E07\ TPAK_{it} + 0.0099569\ IPM_{it} + e_{it}$$

dimana, jika Jumlah Industri, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia mempunyai konstanta 0 maka pertumbuhan ekonomi sebesar 0.819197. Berdasarkan hasil regresi data panel, koefisien dan probablitas dari masing-masing variabel memiliki hasil yang berbeda-beda. Berikut hasil dari interpretasi regresi dan analisis pengaruh Jumlah industri, tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi provinsi jawa timur.

a. β0 yang merupakan nilai konstanta sebesar 0.819197 merupakan besarnya nilai pertumbuhan ekonomi jika jumlah industri, tingkat partisipasi angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia bernilai konstan sebesar 0 maka pertumbuhan ekonomi sebesar 0.819197
b. β1 yang merupakan koefisien Jumlah industri sebesar 1.52E05 mengartikan jika jumlah industri naik satu unit, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 1.52E05 unit. Selain itu variabel jumlah industri memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0202 lebih kecil dari dari nilai α = 5% yang mengartikan jika jumlah industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
c. B2 yang merupakan koefisien tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 2.81E07 mengartikan jika tingkat partisipasi angkatan kerja naik satu persen, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 2.81E07 persen. Selain itu variabel tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki nilai probabilitas sebesar 0. 6138 lebih besar dari dari nilai α = 5% yang mengartikan jika tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
d. B3 yang merupakan koefisien indeks pembangunan manusia sebesar 0.0099569 mengartikan jika indeks pembangunan manusia naik satu indeks, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0.0099569 indeks. Selain itu variabel indeks pemabngunan manusia memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari dari nilai α = 5% yang mengartikan jika indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Jumlah industri berpengaruh positif dan signifikan, jika jumlah industri tinggi maka akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Dalam hal ini dapat kita ketahui Jumlah Industri lebih besar mendorong pertumbuhan ekonomi karena adanya Sektor- sektor Industri dimana mampu menunjukkan peluang yang bersignifikan kepada kabupaten atau kota itu sendiri, memberikan peluang kerja bagi masyarakat setempat dan mengurangi pengangguran. Sesuai dengan teori Maghfur Wachid, industri manufaktur Indonesia berfungsi sebagai penopang utama ekonomi dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, industri ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan inovasi dan produktivitas yang banyak berdampak besar. Untuk melakukan promosi, saat ini menggunakan alat teknologi seperti UMKM, yang dapat membantu pertumbuhan industri karena mereka sekarang juga cukup memberikan kontribusi.

Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan Hasil penelitian sama dengan Teori Neo Klasik mengatakan untuk selalu terdapat satu atau lebih tiga faktor yang berkontribusi pada peningkatan tingkat partisipasi pekerja sehubungan dengan peningkatan output. Di antaranya adalah peningkatan teknologi, kualitras dan kuantitas meningkat dengan tenaga kerja serta memperbaiki pendidikan, tambahan dengan investasi bahkan menabung. Ini menunjukkan bahwa orang dengan pendapatan rendah atau kelompok miskin memiliki akses dan peluang yang terbatas dalam berbagai hal, seperti akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Kristina, 2022) menunjukkan Partisipasi Angkatan Kerja positif tidak Signifikan pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Jawa Timur tidak boleh mengabaikan angkatan kerja. Perlu ada lebih banyak peluang pekerjaan guna dapat meningkatkan hasil-hasil alam yang berpotensi, Infrastruktur yang kondisinya bagus serta faktor-faktor produksi memadai.

Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan Jika Kualitas penduduk dikembangkan makan akan memberikan potensi yang meningkat sehingga dapat menunjukkan nilai potensi Indeks Pembangunan Manusia yang mengalami peningkatan, skill masyarakat untuk mengelola dan memahami sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi terutama hubungannya dengan teknologi yang sekarang sudah mulai bisa berkembang sebagai sarana untuk menaikkan Pertumbuhan Ekonomi. Sejalan bersama teori Pertumbuhan Endogen Oleh Backer, pendidikan serta modal manusia yang tinggi merupakan investasi jangka panjang sehingga bisa meningkatkan kesempatan pribadi berpartisipasi dalam ekonomi yang terus berkembang, yang berarti pendapatan perkapita penduduk terus mengalami kenaikan dan dampaknya semakin berkurang penduduk kurang mampu di tempat tersebut. Tingkat pengetahuan menunjukkan bahwa pendidikan secara umum akan menentukan nilai produktivitas pribadi dengan jangkauan jangka panjang serta jangka pendek

5. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Jumlah Industri, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan indeks pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi jawa timur maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Jumlah industri yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi jawa timur, Jumlah Penduduk yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi jawa timur dan Indeks pembangunan manusia yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi jawa timur.

Daftar Pustaka

Arsyad, N. F. (2018). Pengaruh sektor unggulan terhadap pertumuhan ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2) 43-64

Chude, (2013). Kontribusi Sektor Primer Dan Sektor Sekunder Terhadap Pembangunan Ekonomi

Kabupaten Madiun. *Jurnal Manajemen*,10 (1), 6-13.

Frederich, R., & Nurhayati; Samuel Fery purba. (2023). Peranan Pendidikan Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, *28*(1), 123–136. https://doi.org/10.35760/eb.2023.v28i1.7227

Ghozali, I. R. (2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Gujarati, D, N. dan Porter, D, C. (2012). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat.

Julianto, T. F., & Suparno. (2016). Analisis Pengaruh Jumlah Industri Besar Dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, *1*(2), 229–256. http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/JEB17/article/view/914

Keusuma, S. dan C. N. (2015). PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Suriani dan Cut Nanda Keusuma. *Jurnal Ecosains*, *4*(1), 1–18.

Kristina, F., Angeliani, F., Malaifani, S. R. O., Hayati, N., Hidayati, F. N., Rina, L., & Sadjiarto, A. (2022). Pengaruh Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, *7*(2), 299–314. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1173

Latiffa, N., Rotinsulu, D., & Tumilaar, R. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Dampaknya Pada Jumlah Penduduk Miskin di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *17*(02), 106– 117.

Lubis, R., & K Maria, J. (2013). Pengaruh Teknologi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Provinsi Dki Jakarta. *Diponegoro Journal of Economics*, *2*(1), 1–11. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme

Lucya, C. A. A. (2019). Pengaruh Teknologi Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, *1*(2), 509–518. https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6261

Maulana, A. C. Z. R. C. R. V. M. (2020). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Industri Dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Reklame. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, *5*(1), 1–9.

Mirah, M. R. P. K. I. P. F. (2020). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *21*(1), 85–100.

Mlachila, M., Tapsoba, R., & Tapsoba, S. (2014). A Quality of Growth Index for Developing Countries: A Proposal. In *IMF Working Papers* (Vol. 14, Issue 172). https://doi.org/10.5089/9781498379274.001

Muna, D. L. (2022). Pengaruh Human Capital, Tenaga Kerja, Dan Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Jawa Tengah Tahun 2017-2019 the Effect of Human Capital, Labor, and Technology on Central Java'S Quality. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, *3*(1), 42–53.

Muqorrobin, M., & Soejoto, A. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, *5*(3), 6. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/20602

Nur, A. A. (2023). Analisis Sektor Unggulan Sebagai Daya Saing Dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, *4*(3), 211–217. https://doi.org/10.47065/tin.v4i3.4203

Nuraini, I. (2017). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Seminar Nasional & Call for Paper, FEB Unikama "Peningkatan Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global" Malang*, 79–93.

Nuraini, I., & Hariyani, H. F. (2019). Quality Economic Growth as an Indicator of Economic Development. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*,

20(1), 80–86. https://doi.org/10.23917/jep.v20i1.7104

Peterson, E. W. F. (2017). The role of population in economic growth. *SAGE Open*, *7*(4), 1–15. https://doi.org/10.1177/215824401773609

Prabowo, D. M. M. P. R. S. (2023). Pengaruh Pengangguran, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Populasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, *3*(1), 27–36. https://doi.org/10.11594/jesi.03.01.03

Rohadin, R., & Yanah, Y. (2019). The Influence of Small Micro Industries on Economic Growth. *Journal Of Economics and Policy*, *12*(2), 318–326. https://doi.org/10.15294/jejak.v12i2.17828

Sabilla, M. T. H. S. (2022). Pengaruh belanja pemerintah, pendapatan asli daerah , penanaman modal dalam negeri , indeks pembangunan manusia terhadap PDRB The effect of government spending , local revenue , domestic investment , human development index on GRDP. *Jurnal FEB UNMUL*, *24*(1), 54–64.

Sari, S. D., & Setyowati, E. (2022). Analysis of Unemployment, Capita Income, and HDI on Economic Growth on Indonesia, 2017-2020. *Procedia Of Social Sciences and Humanities*, *3*(c), 8–18. https://doi.org/10.21070/pssh.v3i.195

Serjanaj, L. A., & Zeneli, F. (2018). Population, Economic Growth and Development in the Population, Economic Growth and Development in the Emerging. *European Scientific Journal*, *11* (April 2015), 367–374.

Stern, D. I., & Kander, A. (2018). The role of energy in the industrial revolution and modern economic growth. *Energy Journal*, *33*(3), 125–152. https://doi.org/10.5547/01956574.33.3.5

Sutranggono, D., Sujianto, A. E., Safitri, E. N., & Prastiwi, N. I. (2023). Pengaruh Kesehatan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur Periode 2018-2022. *Jurnal Ekonomi, Akuntasi Dan Manajemen Indonesia*, *2*(02), 24–31. Tirtana, D. (2023). Potensi Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa dan Bali. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, *3*(2), 148–157. https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i2.6064

Tjodi, A. M., Rotinsulu, T. O., & Kawung, G. M. V. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Studi Di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *19*(4), 27–44. https://doi.org/10.35794/jpekd.23428.19.8.2018

Widarjono, Agus. (2018). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya (Edisi Kelima). Yogyakarta: UPP STIM YKPN

DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN)

Adit Abil Faturahman [a,1], Ariel Muhammad Syahril Mubarok [b,2,*], Ilham Marta [c,3], Roja Fauzi [d,4], Muhammad Andi Septian [e,5]

[a,b,c,d,e] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Bandung 40614, Indonesia
[2] arielsyahrilmubarok@gmail.com
* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history
Received December 2023
Revised May 2024
Accepted May 2024

ABSTRACT

The relocation of the National Capital is an urgency and the government's efforts to increase the capacity of Jakarta, which is no longer ideal for becoming the capital city, then have a negative impact on the city of Jakarta itself, however moving the capital city is considered inappropriate because it seems to be too much of a budget which Indonesia considers currently not capable so that I am worried that this relocation will not be a solution but a new problem for Indonesia. The aim of this research is to find out what impacts it will have on Indonesia if the relocation of the country's capital is completed and not completed. This research uses a qualitative approach through data collection, literature, interviews and analysis. content. This research shows that moving the capital city has a negative impact on Indonesia with several things at stake for development such as natural wealth in Kalimantan and also Indonesia's increasing debt which is feared to be difficult to pay off, even though moving the country's capital has a positive impact on Indonesia's economic development and is one of the efforts to handle the city of Jakarta which exceeds its capacity. This research contributes to the government using the budget well so that IKN development runs smoothly.

Keywords
Transfer, Funding, National capital

1. Pendahuluan

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan diupayakan pemerintah untuk segera mungkin selesai. Hal tersebut tidak terlepas dari Upaya pemerataan pembangunan nasional agar tidak terkesan Jawa Sentris serta dapat mengoptimalkan potensi alam di wilayah Indonesia timur sebagai sumber pendapatan negara. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu *major project* di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan tersebut ternyata mendapat beberapa penolakan dari berbagai macam elemen masyarakat. Penolakan tersebut dikarenakan pemindahan Ibu kota negara (IKN) berdampak buruk terhadap kekayaan hutan di kalimatan timur, hal tersebut dikarenakan wilayah pemindahan IKN dikelilingi beberapa area konsesi pertamabangan yang bisa berdampak pada pencemaran air yang akan merusak sistem hidrologi lalu berdampak kepada biodiversitas di Kalimantan. Banyaknya konsensi pertambangan bukan hanya berdampak pada pencemaran air melainkan berpotensi menimbulkan kebakaran. Selanjutnya, rencana pemindahan ASN juga salah satu faktor dampak buruk pemindahan Ibu kota negara (IKN) yang akan menimbulkan masalah sosial yang akan berdampak pada kondisi ASN terutama ASN kementerian, lembaga non kementerian, dan lembaga independent yang mayoritsas sudah lama tinggal di wilyah metropolitan Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kepribadian diantara ASN yang hidup di wilayah metropolitan dan warga sekitar yang mayoritas penduduk wilayah pedesaan atau (*rural area*) akan berdampak konflik horizontal dan konflik vertikal antara dua komunitas.

Warga sekitar yang mayoritas Suku Dayak yang masih berpegang teguh kepada adat istiadat suku Dayak beserta seluruh nilai tradisonalnya berpotensi menentang kedatangan masyarakan urban ASN Walhi (2022). Konflik vertikalpun berpotensi terjadi antara pemerintah dengan masyarakat tradisional yang disebabkan oleh pengalihfungsian lahan, eksploitasi hutan adat, dan mengahasilkan Masyarakat hetorogen tang tidak akur. Faktor lainya adalah penambahan utang negara dan defisit anggaran Pendanaan IKN yang menggunakan skema APBN perlu perencanaan anggaran yang matang Saraswati & Ad (2022). Skema pendanaan IKN yang terpusat pada pendanaan diluar APBN dimana anggaran APBN yang digunakan hanya sebesar 91,29 Triliun saja atau sebesar 19,54%. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan APBN untuk mendanai secara langsung proyek hanya sebesar 19,54%. Sisa anggaran yang dianggarkan bersumber dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU dan modal badan usaha. Pembangunan IKN sendiri menjadi salah satu major project dengan anggaran yang tertinggi bernilai RP 466,98 Triliun (Hidayat, n.d.). Akibatnya, kemungkinan beberapa fasilitas seperti infrastruktur dasar, infrastruktur umum, dan beberapa fasilitas lainnya yang memiliki anggaran bersumber dari KPBU dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu ataupun memakan biaya yang lebih mahal dikarenakan selesai tidak tepat waktu. potensi kerugian yang akan dialami oleh negara apabila proyek IKN selesai. berdasarkan penjelasan sebelumya terdiri dari anacaman kerusakan alam, konflik antar komunitas, dan ketidak stabilan ekonomi.

Penulis akan menguraikan beberapa fakta yang penulis temukan berkaitan potensi kerugian tersebut. Pertama, potensi kerusakan alam. Dalam perencanaan pemerintah dalam *smart governance* pengelolaan kota yang pintar, dengan konsep *forest city* kota yang berkonsep hutan sebanyak 70% area hijau menjadikan IKN (Ibu kota Nusantara) menjadi kota Impian semua orang. Kawasan hutan yang akan dijadikan IKN sebesar 265 ribu hektar, berdasarkan fakta diatas bahwa Kawasan hijau IKN 70% maka ada 30% area hutan yang dideforestasi untuk pembanguan insfrastuktur, namun pada nyatanya Kawasan hutan 256 ribu hektar yang akan dibangun IKN hanya 43% yang layak disebut hutan maka 57% hutan sudah tidak sehat dan akan dideforestasi 30% untuk pembangunan insfrastruktur (Sucahyo, 2023).

Berdasarkan fakta diatas maka dapat kita lihat deforestasi hutan IKN 30% dan ditambah dengan area hutan yang sudah tidak sehat 57% maka setidaknya ada 73% hutan IKN akan rusak yang akan mempengaruhi rusaknya ekosistem pada hutan dan juga sistem hidrologi (Walhi, 2022). Kedua, potensi konflik antar komunitas, potensi konflik akan terjadi dalam pemindahan IKN selain kepribadian antara warga sekitar dan para pendatang yang berbeda. Potensi konflik melalui kekhawatiran warga sekitar seperti suku Balik yang mengkhawatirkan pembangunan IKN akan merusak ruang lingkup mereka seperti proyek normalisasi Sungai Sepaku, Penajam Pasir Utara yang mengancam peninggalan leluhur mereka (KBR, 2023). Kemudian penambahan utang luar negeri dan defisit anggaran Pendanaan IKN yang menggunakan skema APBN perlu perencanaan anggaran yang matang Saraswati & Adi (2022).

Skema pendanaan IKN yang terpusat pada pendanaan diluar APBN dimana anggaran APBN yang digunakan hanya sebesar 91,29 Triliun saja atau sebesar 19,54%. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan APBN untuk mendanai secara langsung proyek hanya sebesar 19,54%. Sisa anggaran yang dianggarkan bersumber dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU dan modal badan usaha. Pembangunan IKN sendiri menjadi salah satu *major project* dengan anggaran yang tertinggi bernilai RP 466,98 Triliun Hidayat (n.d.). Akibatnya, kemungkinan beberapa fasilitas seperti infrastruktur dasar, infrastruktur umum, dan beberapa fasilitas lainnya yang memiliki anggaran bersumber dari KPBU dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu ataupun memakan biaya yang lebih mahal dikarenakan selesai tidak tepat waktu.

Menurut Nugroho (2022) penelitian ini membahas bagaimana bentuk IKN, untuk mengetahui bentuk IKN, serta pendanaan untuk pembangunan IKN Nusantara. Syafrudin & Maiwan (2022) memahami masalah penelitian dengan kritik terhadap pendanaan pemindahan ibukota. Prianggodo (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN memiliki sejumlah potensi masalah dan pembangunan IKN memiliki skala dan pendanaan besar. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir hutang Indonesia sebesar 396,3 miliar US dollar. Agar pemerintah meninjau ulang skema pendanaan yang tidak seimbang dengan APBN yang hanya dianggarkan sebesar 91,29 Triliun atau hanya sebesar 19,54%, berdasarkan fakta faktual diatas dikhawatirkan pendanaan pemindahan IKN akan tersendat atau terlambat sehingga menimbulkan biaya yang melonjak.

Pemindahan IKN berdampak buruk bukan hanya pada pendanaan saja, mega proyek yang begitu besar dan anggaran yang cukup besar sebesar RP 466,98 Triliun yang tidak cukup dengan anggaran APBN dan pemerintah menargetkan Pembangunan IKN selesai dalam kurun waktu 5 tahun yang dikhawatirkan Pembangunan IKN gagal sedangkan yang dipertaruhkan untuk pembangunan IKN adalah kekayaan hutan Indonesia yang akan terancam di deforestasi Karena merurut KLHS untuk melakukan rehabilitas hutan 900 hektare pertahun dengan persen keberhasilan yang rendah, selain itu butuh waktu 99 tahun untuk mentransformasikan hutan IKN menjadi hutan kembali. Penelitian ini berkontribusi untuk pemerintahan di era masa jabatan Presiden Jokowi beserta jajarannya dapat memperkecil resiko kerugian dari kegagalan

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pemilihan metode penelitian ini, karena penelitian kualitatif cocok dengan kajian penelitian kami yang membutuhkan analisis data yaitu kualitatif yang cenderung bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis data. Penelitian ini kami mengambil data primer seperti data pemerintahan yang kami kaji dan data sekunder yang kami ambil dari hasil penelitan dari jurnal-jurnal, Sehingga kami bisa menghasilkan data yang lebih komprehensif. Dampak buruk terhadap IKN sebagai proyek besar dengan anggaran yang timpang dan banyak hal yang dipertaruhkan terhadap Pembangunan IKN membuat kami tertarik dan menjadikan pendanaan pemindahan IKN yang mengalami ketimpangan sebagai objek penelitian. Alasan mengambil pendanaan pemindahan IKN sebagai objek penelitian karena pendanaan adalah faktor

utama untuk kelangsungan dan kelancaran pemindan IKN yang mempertaruhakan kekayaan hutan Kalimantan.

Penelitian ini dilakukan secara analisis data primer yang berasal dari data pemerintahan, dan data sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal dan observasi yang diambil melalui media sosial. Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan terhadap Pemindahan IKN, yakni:

1. Apa urgensi pemerintah memindahkan Ibu kota negara?
2. Bagimana proses pembagunan Ibu Kota Negara?
3. Apa dampak yang akan ditimbulkan akibat pemindahan Ibu Kota Negara

Penelitian ini dibatasi dibatasi dengan ruang lingkup dokumen nasional, jurnal dan juga web yang membahas pemindahan IKN.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Urgensi pemindahan Ibu kota negara

Pemindahan ibu kota negara adalah upaya pemerintah untuk mempersiapkan Indonesia di tahun 2045 menjadi smart government, untuk mencapai tujuannya tentunya Indonesia menjadikan ibu kotanya menjadi panutan kota yang lainya, dengan beberapa konsep ibu kota ideal yang sesuai yang direncanakan pemerintahan. Seperti hasil wawancara peneliti kepada salah satu sumber, ia mengutip dari jurnal pemerintahan Indonesia adalah ibu kota yang *smart, green and beautiful city* guna dapat bersaing secara internasional maupun regional. Adapun harapan dan cita-cita Presiden Joko Widodo dan juga rakyat Indonesia ingin mempunyai ibu kota yang berkelas dunia tentunya ibu kota yang smart, ramah lingkungan dengan mengkombinasikan dengan kayanya budaya Indonesia (Aparatur & Negara, 2022). Kita dampat membayangkan begitu indah ibu kota yang *smart* namun *green* kemudian ibu kota yang maju namun tidak meninggalkan budayanya sendiri, Nampaknya semua orang Indonesia bahkan dunia mengaharapkan ibu kota yang ideal seperti itu.

Ide pemindahan Ibu kota negara pernah direncanakan Presiden Soekarno pada tahun 1957, kemudian pada era orde baru pernah direncenakan pada tahun 1990-an, setelah lama tidak dibahas untuk pemidahan ibu kota negara, ide ini muncul Kembali di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun belum dapat terealisasikan. Keseriusan pada era Presiden Jokowi terhadap pemindahan ibu kota negara menjadikan IKN sebagai salah satu RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024. Dibuktikan keseriusannya, kementerian Bappenas Menyusun akademik rancangan undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota negara kemudian disahkan menjadi undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara pada tanggal 18 juni 2022 kemudian pemerintah menyusun strategi yang strategis melalui peraturan presiden (perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) (Aparatur & Negara, 2022). Berdasarkan wawancara kepada seorang sarjana administrasi publik bahwa ia mengutip Melalui Kementerian Bappenas pemerintah telah menjelaskan beberapa alasan untuk memindahkan Ibu kota negara ke Kalimatan Timur diantaranya sebagai berikut:

a. Daya tampung Jakarta yang tidak ideal

   Salah satu urgensi pemindahan ibu kota Negara adalah upaya pemerintah meringankan daya tampung Jakarta yang sudah tidak ideal lagi baik menampung hal hal yang dianggap penting seperti ekonomi dan politik bahkan sensus penduduk yang padat sudah melebihi kapasitas Jakarta (Turohmah, 2022). Kepadatan penduduk Jakarta sudah melebihi kapasitas maksimum kota Jakarta pada tahun 2013 saja menurut Badan pusat stastistik jumlah penduduk negara Indonesia pada saat itu mencapai 250 juta jiwa dan Jakarta menyumbang 3,6 % yaitu 9.607.787 juta berdasarkan data pemerintahan Jakarta luas kota Jakarta 740,3 Km^2 dengan kepadatan penduduk 14.000 jiwa per-km^2 (UNJ, n.d.). Berdasarkan keterangan diatas kota Jakarta mengalami ketimpangan jumlah penduduk yang tinggi yang tak sesuai dengan luas daerahnya.

b. Kemacetan

Dengan masalah yang sudah akut bagi Jakarta yaitu banjir dan juga kemacetan sepertinya pemindahan ibu kota menjadi upaya pemerintah memperbaiki ibu kota menjadi lebih baik terutama dalam geografisnya, kementerian Bappenas menyatakan salah satu urgensi pemindahan ibu kota keluar pulau jawa adalah karena masalah macet dan banjir yang sulit atau sudah menjadi akut sehingga kota Jakarta menjadi kota terburuk ke 4 saat sibuk lalu lintas dari 390 kota yang di survei . Kemudian kota Jakarta teurut pada urutan ke 9 kota terburuk untuk kepuasan pengemudi. Kemacetan kota Jakarta yang sulit diatasi karena kepadatan penduduk mengakibat kerugian (Prabowo, 2009).

c. Banjir

Jumlah penduduk yang berimbang menurut WHO batas maksimal 9.600 jiwa tiap km^2 sedangkan Jakarta melebihinya hal ini yang akan berdampak negatif kepada kota Jakarta salah satunya banjir, kebaran dan juga tentunya macet yang menggangu aktifitas lalu lintas kota (Razii Abraham, Dicky Iqbal Lubis, Muhamad Indrawan, 2023).

Berdasarkan beberapa data yang kami paparkan diatas dari beberapa urgensi pemindahan Ibu kota negara (IKN) dapat kita lihat begitu urgen pemindahan ibu kota negara salah satunya yang paling terpenting daya tampung kota Jakarta yang sudah tidak ideal tentunya selain situasi yang urgen pemindahan ibu kota pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk memindahkan ibu kota, kami mewawancarai beberapa tujuan pemindahan Ibu kota negara yang paling terpenting adalah pemerataan ekonomi di Indonesia bagian timur dengan harapan dapat merubah perekonomian Indonesia yang terkesan jawasentris menjadi merata (Hasibuan & Aisa, 2020). Pemerintah memindahkan Ibu kota baru ke kalimatan timur adalah upaya mengatasi kesan jawasentris di Indonesia yang dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya:

a. Kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di pulau jawa mencapai 56,10 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia, dapat dilihat dari hasil data BPS tahun 2020 menyatakan populasi penduduk dipulau jawa mecapai 151,59 juta.
b. Pulau jawa mendominasi kontribusi ekonomi paling tinggi dalam produk domestik bruto (PDB) sebesar 57,89 persen pada tahun 2021 hasil data Badan pusat stastistik (BPS) konstribusi pulau Jawa kepada negara Rp16.970,8 triliun dengan pendapatan perkapita dari Produk domestic bruto (PDB) sebesar RP. 62,2 juta atau setara dengan USD4.349,5 yang dimana pendapatan PDB di pulau jawa didominasi oleh daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) 20,85 persen dari pulau jawa, sedangkan yang mendominasi pada daerah tersebut adalah Jakarta PDB perkapita di Jakarta mencapai Rp 274,7 juta sementara rata-rata nasional hanya mencapi 62,2 juta

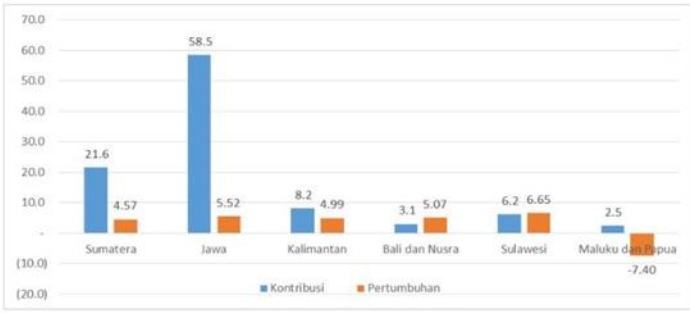

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Terhadap PBD Nasional Per Pulau (2019)

2) Proses Pembangunan IKN ditinjau melalui yuridis hingga tahapan pembangunan

Ide pemindahan Ibu kota negara pernah direncanakan Presiden Soekarno pada tahun 1957, kemudian pada era orde baru pernah direncenakan pada tahun 1990-an, setelah lama tidak dibahas untuk pemidahan ibu kota negara, ide ini muncul kembali di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun belum dapat terealisasikan. Keseriusan pada era Presiden Jokowi terhadap pemindahan ibu kota negara menjadikan IKN sebagai salah satu RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024. Dibuktikan keseriusannya, kementerian Bappenas menyusun rancangan undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota negara kemudian disahkan menjadi undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara pada tanggal 18 juni 2022 kemudian pemerintah menyusun strategi yang strategis melalui peraturan presiden (pepres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) (Aparatur & Negara, 2022).

Tabel 1. kilas balik penyusunan UU IKN

29 september 2021	Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada DPR terkait perencanan pemindahan Ibu kota
7 Desember 2021	DPR RI membuat panitia khususs tekait merancang UU pemindahan IKN
18 Januari 2021	UU IKN versi awal dikeluarkan dan terus di " matangkan'
15 febuari 2022	UU IKN disyahkan

Sumber: Journal Keilmuan Gamapi Kajian IKN

Proses pembangunan IKN sendiri sudah berjalan di mulai sejak 29 september 2022 kementerian PUPR Basuki Hadi muljono telah mendatangina kontrak paket pengerjaan kontruksi.pembangunan IKN sendiri memiliki tahan yang sudah diatur dalam rancangan Pepres perinciaan rencana induk kota Nusantara(Bappenas, 2022)

Tabel 2. tahap pembangunan IKN

Tahap I	2022-2024	Fokus pembangunan insfraktuktur utama Kompleks istana kepresidenan, perkantoran pemerintah, perumahan ASN dan personal Hankam serta telekomunikasi energi/ kelistrikan dan tranfortasi
Tahap II	2025-2029	Fokus pembangunan di ranah insfrastuktur dan lingkungan (bandara, bendungan, sistem pengelolaan air limbah domestik dll) pengembangan Kawasan IKN, perluasan Kawasan (perkantoran, kawasan industri, universitas, hotel, dll) serta pertahan (Kemenhan, Polri, BIN, BSSN)
Tahap III	2030-2034	Fokus pembangunan diranah insfrastuktur dan lingkungan (sistem angkutan umum, pengelolaan air), pengembangan kawasan dan perluasan beberapa kawasan (perkantoran, kawasan industri, universitas, hotel dll) serta pertahanan (Kemenhan, Polri, BIN, BSSN, dll)
Tahap IV	2035-2039	Fokus pembangunan diranah insfraktuktur dan lingkungan seperti kereta api regional, ekspansi sistem pengelolaan air limbah, pembangunan solar farm dll, Pengembangan 4 kawasan yaitu KIPP tahap 2A, IKN barat, IKN timur, dan Kawasan utara, perluasan beberapa Kawasan perkantoran,Kawasan industry, universitas, hotel dll) serta pertahan (Kemenhan, Polri, BIN, BSSN)

Tahap V	2040-2045	Infrastuktur dan transfortasi tahap akhir dan pengembangan potensi bendungan multi guna

Sumber: Artikel web resmi KPBU

Tabel 3. Rincian Fasilitas di IKN Beserta Skema Penganggarannya

Sumber Anggaran	Fasilitas
APBN sebesar 91,29 Triliun	1. Istana negara dan bangunan strategis TNI/POLRI. 2. Pengadaan lahan. 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4. Pangkalan militer
KPBU sebesar 252,46 Triliun	1. Infrastruktur dasar (Air minum dan sanitasi) 2. Rumah dinas ANI/TNI/POLRI 3. Infrastruktur utama (selain yang tercakup dalam APBN) 4. Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 5. Urban transport berbasis rel. 6. Peningkatan konektivitas (bandara, Pelabuhan, dan jalan tol) 7. Sarana Pendidikan, sarana Kesehatan, dan museum.
Badan Usaha sebesar 123,23 Triliun	1. Perumahan 2. Pembangunan perguruan tinggi dan swasta. 3. Science-technopark. 4. Sarana Kesehatan swasta. 5. Pusat pembelanjaan. 6. MICE

Sumber: Diolah dari Bappenas (2020) dalam Fadhil Hasan (Peneliti INDEF)

Adapun tahapan pembanguan IKN saat ini berdasarkan wawancara kami terhadap sarjana Administrasi publik sudah mencapai 38,1 % yang sampai saat ini masih dari awal pembangunan dimana akan selesai pada tahun 2024 (Aidilla, 2023). Adapun perencanaan tahapan I

Gambar 2. Perencanaan Pembangunan Tahap 1

Beberapa pembangunan insfraktuktur sudah berjalan beberapa persen seperti tahap 1 IKN yang kontraknya sudah mulai sejak 2021 seperti jalan tol akses IKN tahap I kemdian banguan Istana

Merdeka, kantor Presiden (Dwi Andika Silaban, 2023) lapangan upacara sudah mencapai 22,1% pembagunan kemudian kantor presiden sudah mencapai pembangunanya sekitar 27,525 % , lalu proses pembangunan kantor sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 22,72%, Selanjutnya langkah selanjutnya pembangunan terhadap kantor kementerian kordinator 1 sudah mencapai 12,78% kementerian kordinator 3 sudah mencapai 10,429% kementerian koordinator 4 15.135% kemudian progres bangunan kantor sekretariat negara sudah mencapai 16,165 %, sementara itu rumah tapak jabatan mentri (RTJM) sudah mencapai proses bangunan 22,681% (Brilian,2023). Adapun proses pembangunan tahap 2 mencakup proyek-proyek yang ditandatangani pada April sampai Mei 2023 seperti bangunan kementerian kordinator 2 dan rumah ASN (Dwi Andika Silaban, 2023) sudah mencapai 0,09% yang terdiri dari 39 paket fisik terkontrak dan juga sedang proses lelang (Brilian, 2023).

Berdasarkan keterangan di atas Pembangunan IKN terlihat berjalan dari mulai tahap 1 yang sudah mencapai 38,1% dan juga tahapan 2 yang sudah mencapai 0,09%, namun ternyata didalamnya ada beberapa kendala yang menghambat pembanguan IKN seperti:

a. Investasi Swasta IKN masih terbatas

Tabel 4. Rincian IKN Sebagai Bagian dari Major Project 2019-2024

No	Nama Proyek Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
10	Ibu Kota Negara (IKN)	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Indonesia Timur (KIT) untuk pemerataan wilayah.	466,98 • APBN: 91,29 • KPBU: 252,46 • Badan Usaha: 123,23	Kementerian PUPR, Kementerian Bappenas, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Usaha.

Sumber: Lampiran II Perpres No 18 Tahun 2020

Berdasarkan wawancara kami kepada Mahasiswa jurusan Adminitrasi publik bahwa Pendanaan IKN melalui 3 sumber pendanaan yaitu APBN (anggaran pendapatan belanja negara) 90,4 T , sumber kedua sektor swasta 24ocial24u sebesar 123,2 T, kemudian sumber ketiga bersumber KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha 252,5 T (Kementerian luar negeri, 2023). Namun realisasi investasi badan usaha milik swasta masih terbatas, saat ini dana bangunan masih terpangku pada APBN walaupun deputi bidang otoritas IKN Agus wicaksono mengklaim minimnya pembiyaan swasta proyek IKN bukan berarti sepi peminat sudah 160 *letter of intent* (LOI) yand dating dari investor luar negeri (koran tempo, 2023)

Berdasarkan wawancara kami terhadap sahabat kami Sarjana Adminitrasi Publik skema KPBU sendiri memiliki beberapa kendala diantaranya:

1. Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama.
   Proses pelelangan tender untuk proyek dengan skema KPBU memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan proyek IKN ditargetkan selesai dalam 5 tahun. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap Pembangunan IKN dikarenakan mayoritas dana yang digunakan untuk membangun IKN berasal dari KPBU yaitu sebanyak 252,46 Triliun atau setara 54,06%.
2. Proyek KPBU mayoritas dikuti dan dilaksanakan oleh BUMN.

Proses Pembangunan dengan skema KPBU juga bermasalah dikarenakan mayoritas dikerjakan BUMN yang juga di danai oleh APBN. Hal tersebut tentunya akan menurunkan daya saing pada setiap tahap Pembangunan dikarenakan Badan Usaha yang mengikuti kompetisi pelelangan proyek memiliki sumber modal yang sama yaitu berasal dari pemerintah.

Permasalahan pendanaan yang dikhawatirkan proyek IKN tidak dapat terselesaikan hingga tahap akhir atau dikhawatirkan selesai namun menambah biaya karena terlambatnya proses pembangunan sehingga memperbesar hutang Indonesia.

b. Problema lingkungan dan sosial penetapan IKN

Gambar 3. Periode 2020-2024 Pemindahan Tahap Awal

Pada salah satu rencana tahap ke 1 adalah dipindahkannya para ASN Rentan konflik sosial karena setidaknya ada 4 kecamatan seperti ada 26 desa di kecamata sepaku kemudian 23 desa di kecamatan samboja selanjutnya 8 desa yang tedapat pada kecamatan muara jawa dan juga 15 desa pada kecamatan lou jumlah penduduk masing-masing kecamatan sebagai berikut.

Tabel 5: Sensus penduduk daerah wilayah rencana IKN

Kecamatan	Desa	Jumlah penduduk
Sepaku	26	31.814 jiwa
Samboja	23	63.128 jiwa
Muarajawa	8	37.857 jiwa
Lou	15	52.736 jiwa

Source: WALHI

Berdasarkan data diatas setidaknya ada 4 kecamatan yang akan terdampak dengan pemindah ASN 7.687 jiwa. Terdapat dokumen yang berdar terhadap tahap pertama IKN salah satunya pemindahan ASN paling tidak setiap ASN yang pindah terdapat 4 orang (Walhi, 2022) yang

mengikuti pindah (suami/istri dan 2 anak/ perkerja rumah tangga). Hal tersebut dikarenakan perbedaan kepribadian diantara ASN yang hidup di wilayah metropolitan dan warga sekitar yang mayoritas penduduk wilayah pedesaan atau (*rural area*) akan berdampak konflik horizontal dan konflik vertikal antara dua komunitas. Warga sekitar yang mayoritas Suku Dayak yang masih berpegang teguh kepada adat istiadat suku Dayak beserta seluruh nilai tradisonalnya berpotensi menentang kedatangan masyarakan urban ASN. Konflik vertikalpun berpotensi terjadi antara pemerintah dengan masyrakat tradisional yang disebabkan oleh pengalih fungsian lahan, eksploitasi hutan adat, dan mengahasilkan masyarakat hetorogen yang tidak akur.

Berdasarkan wawancara kami kepada sahabat kami seorang Sarjana Administrasi Publik beberapa kendala dikhawirkan kendala tersebut yang paling urgen adalah kendala dana menghalangi pembangunan IKN atau pembangunan IKN tidak dapat terselesaikan dan membuat kerugian dari beberapa hal yang dipertaruhkan untuk pembangunan IKN.

3) Dampak Akibat pemindahan IKN

Kendala yang sangat mengacam adalah pendanaan yang timpang karena sumber pendanaan IKN yang pasti pada pendanaan APBN 90,4 T atau hanya sebesar 19 % yang dikhawatirkan tak dapat menyelesaikan proyek ini, sedangkan banyak yang dipertaruhkan untuk proyek ini seperti:

a. Dampak terhadap alam

Pemerintahan mengusung konsep IKN sebagai kota maju, pintar, hijau *forest city* dimana 75% IKN merupakan kawasan hijau , Namun jadi pertanyaan kritis karena karena 256 ribu hektar itu hutan, jika kawasan hijau 75% berarti akan terjadi deforestasi sebesar 30% untuk pembagunan infrastuktur dan sebagainya. Lebih lanjut laporan BAPPENAS menjelaskan bahwa diketahui kawasan hutan yang akan menjadi IKN dalam kondisi hutan yang tidak baik.Dari 256 ribu hektar ada 43% saja yang berhutan artinya terjadi deforestasi sekitar 57 % kawasan.

Maka penting sekali rasanya meningkatkan *forest recovery*, lalu mampukah mentraformasikan hutan eukaliptus yang berkualitas lebih rendah dari primer hutan tropis yang mampu mensuplai oksigen, biodervitas, kelstarian hutan dan lainya.

Dari deforestasi tersebut banyak sekali dampak resiko yang besar untuk Pembangunan IKN karena merurut KLHS untuk melakukan rehabilitas hutan 900 hektar pertahun dengan tingkat keberhasilan yang rendah, selain itu butuh waktu 99 tahun untuk mentransformasikan hutan IKN menjadi hutan kembali. Pembangunan IKN bukan hanya berdampak kepada perihal ekonomi saja, namun dapat berdampak kepada kekayaan hutan Indonesia, dalam kajian KLHS terhadap IKN setidak ada 3 faktor dampak dari IKN:

i. Ancaman terhadap sistem tata air dan perubahan iklim

Deforestasi akan menyebankan perubahan siklus hidrologi, Dampak rusaknya siklus hidrologi akan meyebabkan pencemaran air dan kekeringan sehingga bukan hanya berdampak kepada kesehatan bumi, namun akan berdampak juga terhadap ekonomi, Ketika pencemaran air dan kekeringan terjadi akan meningkatnya biaya ekonomi terhadap air.

ii. Ancaman tehadap flora dan fauna

Di tinjau dari perubahan siklus hidrologi menyebabkan pencemaran air dan kekeringan yang akan berdapak kepada flora dan fauna di area IKN dampak buruk kepda flora dan fauna yang akan berdampak buruk juga kepada ekosistem hutan tropis, maka akan merusak sistem rantai makanan.

iii. Ancaman terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup

Lokasi IKN 256 ribu hektar bukan semuanya area *forest*, namun hanya 43% saja yang berhutan, telah tercatat 162 konsensi tambang dan 2 konsensi hutan, seperti mana yang

kami paparkan dari keterangan (Walhi, 2022) area IKN mengalami 57% deforestasi sebelum perencanaan IKN di rencanakan dan pemerintahan menjadikan IKN sebagai capaian menjadi kota yang berkelanjutan dunia yang didalamnya salah satu *forest city* 75 % minimal, ini yang menjadi pertanyaan kritis, Ketika IKN dalam perencaanan saja area hutaninya sudah terdeforetasi 57% oleh area kosensi dan ditambah insfraktuktur IKN yang berkisar 30% deforestasi dan ini yang akan mengacam terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup.

b. Dampak terhadap politisi daerah setempat
   Pembentukan jajaran pemerintah yang akan memerintah IKN berbeda dengan pembentukan jajaran pemerintah DKI Jakaerta sebagai Ibu kota Indonesia hari ini. Indonesia menghendaki adanya pembentukan provinsi khusus DKI Jakarta dimana wilayah tersebut memiliki beberapa kedudukan khusus akan tetapi memiliki proses pemerintahan yang sama dengan provinsi lainnya termasuk mengadakan pemilu untuk memilih kepala daerah. Hal tersebut membuat warga DKI Jakarta masih dapat memilih Gubernur dan wakilnya. Sementara itu, IKN Nusantara dipimpin oleh Ketua Otorita yang bertaraf setingkat menteri yang dipilih langsung oleh presiden atas persetujuan DPR, hal tersebut menyebabkan tidak adanya pemilu bagi masayarakat IKN sehingga proses pemilihan kepala daerah tidak dijalankan secara demokratis.
c. Ancaman permasalahan fiskal terhadap hutang
   Permasalahan hutang merupakan permasalahan yang menjadi ancaman pada proyek pembangunan fisik terutama proyek pembanguan infrastruktur berskala besar. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya pemerintah menekan porsi anggaran secara besar untuk membiayai proyek tersebut. Hal tersebut meyebabkan teralihkannya porsi anggaran belanja untuk belanja-belanja lainnya seperti belanja program sosial, belanja aset pertahanan, dan belanja-belanja lainya yang tidak kalah penting dengan proyek infrastruktur. Menurut (Paramita & Panjaitan, 2018) pada tahun 1998-2017 mengalami ketidakseimbangan sustainabilitas fiskal indonesia, hal ini disebabkan pemerintah yang mengejar salah satu programnya yang tertinggal yaitu pembangunan infrastruktur yang menyebabkan peminjaman hutang yang cukup besar untuk menutupi anggaran pembiayaan pembangunan infrastuktur. Saat ini kecenderungan pemerintah pusat menggunakan pembiayaan jangka pendek lebih besar dari pada pembiayaan jangka pendek yang tentunya akan memperbesar hutang indonesia karena pemerintah menggunakan pembiayaan jangka pendek untuk pembangunan jangka pendek sehingga berkonsekuensi Indonesia memakai hutang baru untuk menutup hutang yang jatuh tempo

Berdasarkan metode VECM, pengaruh positif terhadap fisikal dipengaruhi rasio hutang sebelumnya terhadap PDB, inflasi, suku bunga riil dan pertumbuhan ekonomi yang menyeimbangkan fiskal. Walaupun berdasarkan analisis bahwa ketiga rasio turun yaitu rasio utang terhadap PDB, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan, rasio keseimbangan primer terhadap PDB. Mengindikasikan tidak meningkatkan posisi keuangan pemerintah karena pemanfaatan utang menjadi tidak produktif karena pemerintah meminjam utang untuk membayar bunga utang bukan untuk belanja kebutuhan produktif. Inilah yang membuat ancaman utang indonesia karena pemerintah terus mendahulukan target pembangunan infrastruktur daripada keseimbangan sustainabilitas pada tahun 2017 ditambah dalam periode 2019-2024 indonesia memiliki 40 proyek besar dengan proyek yang mengunakan anggaran besar diantaranya pemindahan IKN, kereta cepat, revitalisasi pulau komodo

4. Kesimpulan

Kota Jakarta yang terdampak ancaman banjir dan tenggelam serta polusi akibat kepadatan penduduk yang menjadikan pemindahan ibu kota menjadi solusi. Saat ini Pembangunan Ibu kota negara baru, telah berjalan proses pembagunan tahap 1 dan tahap 2 terlihat baik-baik saja. Namun pemindahan

Ibu kota Negara baru akan berdampak buruk dan mengancam terhadap alam di area IKN sendiri, terlebih pendanaan pemindahan Ibu kota yang dikhawatirkan tidak terselesaikan karena dana anggaran yang tidak stabil. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan pembangunan IKN tetap perlu dilanjutkan dikarenakan sudah berjalan dengan baik dan urgensitas yang penting karena Jakarta sering terjadi bencana banjir, polusi dan jumlah penduduk yang terlampau padat. Namun penulis juga menyarankan pemerintah perlu mencari investor agar keberlanjutan pembangunan IKN dapat berjalan dengan baik dan berhenti menggunakan APBN.

Daftar Pustaka

Aidilla, T. (2023). *Progres Pembangunan IKN Nusantara*. REPUBLIKA.

Aparatur, T., & Negara, S. (2022). The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning (JISDeP) is a journal published by Centre for Planners' Development Education, and Training (Pusbindiklatren), Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency Republi. *Simpul Perencana*, *43*.

Bappenas, K. (2022). *rancanganperaturanIKN*. Kementerian Bappenas.

Brilian, A. P. (2023). *"Begini Progres Pembangunan IKN Sampai Saat Ini."* DetikProperti.

Dwi, AndikaSilaban, M. W. (2023). *Begini Progres Pembangunan IKN per Agustus 2023, Sudah Bisa Ditempati 2024?* Tempo.Co.

Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *5*(1), 183–203.

Kementerian luar negeri. (2023). *Minat Investasi ASEAN di IKN, Dari Properti Hingga Energi Terbarukan*. Kementerian Luar Negeri.

koran tempo. (2023). *7 fakta pembangunan IKN, dari kendala biaya hingga ancaman banjir*. Koran Tempo.

Paramita, R., & Panjaitan, J. Y. (2018). Dampak Utang Pemerintah Pusat Terhadap Keberlanjutan Fiskal Indonesia Periode 1998-2017. *Jurnal Budget*, *03*(01), 1–27.

Prabowo, H. (2019). *Soal Ibu Kota Dipindah, Komisi II: Beban Jakarta Sudah Sangat Berat Baca selengkapnya di artikel "Soal Ibu Kota Dipindah, Komisi II: Beban Jakarta Sudah Sangat Berat."* Tirto.Id.

Razii Abraham, Dicky Iqbal Lubis, Muhamad Indrawan, dan R. F. (2013). *VISA MASUK KOTA: ALTERNATIF KEBIJAKAN KAUM URBAN UNTUK MENGATASI KEPADATAN PENDUDUK JAKARTA*.

Turohmah, S. N. ia, Wulandari, D. A., Rozan, F. A., & Imaduddin, A. H. (2022). Membongkar

rencana pemindahan Ibu kota. *Keilmuan-Gamapi_Kajian-IKN_17-Mei-2022*.

UNJ, R. (n.d.). *"Apakah terdapat perbedaan tingkat subjective well-being pada masyarakat DKI Jakarta yang ditinjau dari faktor demografi ?"*

Wallhi. (2022). *RUU Ibu Kota Negara: Mengulang Inkonstitusionalitas Omnibus Law*. Https://Www.Walhi.or.Id/Index.Php/Ruu-Ibu-Kota-Negara-Mengulang-Inkonstitusionalitas-Omnibus-Law.

Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Kopi di Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember

Nabila Athesa Angie [a,1,*], Aisah Jumiati [b,2], Edy Santoso [c,3], M. Abd. Nasir [d,4], Robby Reza Zulfikri [e,5], Siti Komariyah [f,6]

[a,b,c,d,e,f] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37, Jember 68121, Indonesia
[1] nabilaunej@gmail.com; [2] aisahjumiati@gmail.com; [3] edysantoso@unej.ac.id; [4] abd.nasir@unej.ac.id; [5] 199308312023211017@mail.unej.ac.id; [6] sitikomariyah.feb@unej.ac.id
* Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history
Received March 2024
Revised April 2024
Accepted May 2024

ABSTRACT (10PT)

This research was conducted to knowing the Development Strategy coffee-based areas in the Mandigu Mountains, Mumbulsari District, Jember Regency. This research was conducted in Lambeji Village, Mumbulsari District, Jember Regency. This type of research is qualitative descriptive research with data analysis methods using the SWOT method. The result obtained in this research are: 1) Internal factors that influence the development of coffee-based areas in the Mandigu Mountains are adequate geographical conditions (strengths) and the lack of farmers and accesbility that is difficult to reach (weakness). 2) External factors that influence the development of coffee-based areas in the Mandigu Mountains are land use by planting other crops (opportunity) and erratic weather changes that can hamper the growth and quality of coffee (threat). 3) The result of the analysis show that the strategy obtained from the matrix is that the alternative strategies are providing a supply of quality coffee seeds which is carried out in developing the coffee business, utilizing fertile land conditions with quality coffee to meet the increasing demand for coffee consumers, increasing income diversification, especially additional daily income with land optimization efforts.

Keywords
Internal Factor, External Factor, Alternative Strategy.

1. Pendahuluan

Kopi adalah salah satu minuman paling populer di seluruh dunia. Secara umum, kopi bukanlah bagian dari gaya hidup sehat karena kopi mengandung kafein yang bersifat stimulan. Namun kopi merupakan sumber yang kaya akan anti oksidan dan senyawa bioaktif lainnya (Farah 2012). Indonesia mempunyai beragam jenis kopi yang diminati dimana semua jenis kopi tersebut memiliki ciri khas atau keunikan masing-masing tiap daerahnya. Adapun jenis kopi yang diminati oleh para pecinta kopi diantaranya yaitu kopi arabika gayo Aceh (Sumatra), kopi arabika Toraja (Sulawesi), kopi arabika Java Ijen Raung (Jawa Timur), kopi robusta Temanggung (Jawa Tengah), kopi arabika Flores Bajawa (NTT), kopi Bengkulu dan berbagai jenis kopi yang lain (Yuhono 2009) . Secara umum, hampir 90% kopi jenis arabika dan robusta yang lebih banyak ditanam di Indonesia. Namun, dari segi jumlah produksi kopi arabika yang sedikit ini, mampu membuat kopi Indonesia terkenal dengan cita rasa yang unik dan menduduki jajaran jenis kopi terbaik di dunia. Kopi Indonesia diperdagangkan dalam bentuk kopi bubuk, kopi instan, dan bahan yang mengandung kopi lainnya (Rismunandar, 2011)

Data yang terdapat pada BPS Jawa Timur (2023) menunjukan bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbanyak ketiga di Provinsi Jawa Timur dengan kapasitas produksinya sebesar 11.795-ton dibawah Kabupaten Malang sebagai peringkat pertama dengan kapasitas produksi sebesar 13,047-ton dan Kabupaten Banyuwangi yang menduduki peringkat kedua dengan kapasitas produksi sebesar 12.504-ton pada tahun 2022. Akan tetapi, kapasitas tersebut mengalami penurunan di setiap wilayah salah satunya Kabupaten Jember sebanyak 32-ton dari tahun 2021 yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 11.827 ton. Penurunan pada kapasitas produksi kopi tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Jember saja, tetapi juga terjadi pada kabupaten/kota lainnya, seperti Malang, Banyuwangi, Bondowoso, dsb. Berikut adalah tabel yang menunjukan 4 kabupaten/kota yang memiliki nilai produksi kopi terbanyak di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021-2022.

Tabel 1. Produksi Kopi Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2021-2022

No	Uraian	2021	2022
1.	Malang	13.207	13.047
2.	Banyuwangi	12.547	12.504
3.	Jember	11.827	11.795
4.	Bondowoso	10.464	11.420

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2023)

Kabupaten Jember sudah dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil kopi yang cukup maju di Provinsi Jawa Timur. Kopi yang dimiliki oleh Jember dengan aroma khas dan cita rasa yang sangat istimewa meyakini bahwa kopi tersebut terkenal karena banyaknya penikmat kopi dikalangan masyarakatnya. Jenis kopi robusta dan kopi arabika yang merupakan jenis kopi yang banyak dikembangkan karena budidaya dari kopi arabika dan juga kopi robusta tersebut dianggap lebih mudah dalam hal perawatannya yang sesuai dengan kondisi dari lahan atau lingkungannya. Dengan begitu, para petani kopi harus memperhatikan beberapa aspek agar kopi yang dihasilkan banyak dan bersih. Hasil tanaman kopi yang dirawat sesuai dengan *Standard Operational Procedure* dan *Good Agricultural Pracctices* (SOP/GAP) akan membuahkan hasil yang berkualitas.

Jember sendiri memiliki beberapa wilayah tanaman kopi yang tersebar di penjuru kecamatan, salah satunya di pegunungan Mandigu, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Jika dilihat dari ketinggian, mayoritas masyarakat setempat menanam kopi jenis robusta yang ditanam di sekitar rumah hingga daerah tanah pegunungan atau perbukitan sebagai mata pencahariannya. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada budidaya tanaman kopi ini seperti minimnya pengetahuan

petani terhadap perawatan untuk penanaman kopi di wilayah ini. Selain itu, ongkos operasional, mesin atau peralatan, serta biaya produksi juga menjadi kendala bagi petani usaha kopi. Absennya pemerintah dalam pendampingan saat budidaya, pengolahan panen dan pascapanen hingga infrastruktur jalan yang dapat membahayakan petani dalam kesehariannya untuk kegiatan budidaya tanaman kopi bukan lagi rahasia umum jika pemerintah masih dinilai abai. Sebab, kebanyakan para petani kopi harus berjuang sendiri dalam melakukan penanaman dan perawatan budidaya hingga memasarkan kopi. Dari paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk strategi pengembangan kawasan berbasis kopi di pegunungan mandigu kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Produksi

Menurut Sugiarto (2007) produksi diartikan sebagai kegiatan yang dapat merubah suatu input menjadi output. Biasanya pada kegiatan ekonomi ini dapat diyatakan dalam fungsi produksi. Terdapat dua konsep mengenai kegiatan proses produksi, antara lain:

a. Kuantitas barang ataupun jasa yang dihasilkan
   Kegiatan produksi ini adalah menghasilkan barang dan juga jasa yang belum ada sehingga bertambah jumlahnya ataupun memperbesar ukurannya. Contoh usaha peternakan, pertanian, dan perikanan.
b. Menambah nilai guna barang dan jasa
   Kegiatan menambah nilai barang dan jasa diartikan sebagai kegiatan yang menambah nilai agar barang dan juga jasa menjadi lebih tinggi. Contohnya pada kopi terbuat dari biji kopi, keripik yang terbuat dari singkong, dsb.

Dalam bidang pertanian, produksi dipengaruhi berbagai macam faktor seperti luas lahan, bibit, pupuk, obat hama (pestisida), system irigasi, tenaga kerja, iklim, dan sebagainya. Produksi menunjukan tingkat hasil dari kuantitas pertanian, menurunnya produksi dipengaruhi oleh berbagai hal yang salah satunya yaitu iklim dan pola curah hujan. Perubahan iklim memiliki pengaruh negative terhadap produksi pertanian (Utami, *dkk*., 2011).

Konsep Pengembangan Modal Usaha

Modal usaha menurut Listyawati Ardi Nugraha (2011)) adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, benda, dan sebagainya) yang dapet digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Pengertian dari modal usaha ini dapat dideskripsikan sebagai sejumlah uang yang dapat dgiunakan dalam menjalankan suatu usaha/bisnis. Masih banyak kalangan yang menganggap jika modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis.

Perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi pembasahan disini bukan hanya penting tidaknya sebuah modal, karena keberadaanya yang masih sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana cara mengelola modal tersebut secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar (Amirullah, 2015;7). Modal untuk usaha pertanian sangat diperlukan guna mendapatkan sarana produksi yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.

Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia diartikan sebagai kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), serta kemampuan (*skill*) yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas manusia akan

pengetahuan dan kemampuan. (Kadarisman, 2013). Menurut Schuler (1992) tujuan dari kegiatan pengembangan sumber daya manusia, antara lain

a. Meningkatkan produktivitas
   Produktivitas Sumber Daya Manusia dapat meningkat karena keterampilan dan pengetahuan seperti *human skill*, *technical skill*, serta *mangerial skil*l SDM yang semakin baik.
b. Memastikan semua berjalan efisiensi
   Pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, serta memperpanjang waktu dalam penggunaan peralatan pekerjaan.
c. Menciptakan moral
   Moral SDM akan menjadi lebih baik karena adanya kejujuran, rendah hati, dan mau bekerja keras dalam pekerjaan. Suasana pekerjaan menjadi menyenangkan yang akan berimbas pada etos kerja yang baik.
d. Menaikkan balas jasa
   Ketika pengembangan SDM dilakukan, dapat memungkinkan adanya peningkatan balas jasa maka kualitas pekerja dalam kemampuan dan keahlian SDM semakin membaik.

3. Metode Penelitian

Penelitiaan ini menggunakan jenis data kualitatif. data kualitatuf diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan seperti observasi lapang, wawancara, hasil analisis,dsb. data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Menurut (Nazir 2014) Analisis deskriptif merupakan suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, objek, kondisi, atau suatu golongan peristiwa pada masa sekarang, bertujuan untuk menciptakan gambaran yang sistematis, faktual, serta fenomena yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mnjelaskan suatu potensi, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan berbasis kopi di Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember berdasarkan hasil dari data-data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder. Analisis data-data tersebut digunakan untuk memecahkan permasalahan guna menganalisis strategi yang tepat terhadap pengembangan kawasan kopi di Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Analisis SWOT merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam suatu proyek atau pada sebuah usaha bisnis. Penentuan strategi ini digunakan guna mengidentifikasi suatu objek yang akan dianalisis. Untuk menentukan suatu strategi yang terdapat dalam analisis SWOT melalui dua tahapan yaitu analisis IFAS – EFAS. Analisis IFAS merupakan analisis yang mempertimbangkan aspek kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam faktor internal. Sedangkan analisis EFAS adalah analisis yang mempertimbangkan dari segi peluang serta ancaman yang terdapat pada faktor eksternal. Hasil dari analisis IFAS dan EFAS nantinya digunakan dalam matrik IE (Kosasih 2017).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, hasil analisis faktor internal dan eksternal dalam matriks IFAS. Matriks IFAS dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor lingkungan serta mengukur sejauh mana kekuatan dan juga kelemahan yang dimiliki IFAS sedangkan untuk matriks EFAS ditujukan untuk mengidentifikasi terhadap faktor lingkungan eksternal dan juga mengukur sejauh mana peluang serta ancaman yang akan dihadapi.

Berdasarkan hasil identifikasi dari faktor-faktor internal, maka tersusun dalam Matriks *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS), sebagai berikut :

Tabel 1. Matriks Analisis Faktor Internal IFAS

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
	Faktor Kekuatan *(Strength*)			
1	Luas lahan yang tersedia menjadi pendukung	0,14	4	0,56
2	Kondisi tanah yang subur membuat tanaman kopi tumbuh dengan baik.	0,13	3	0,39
3	Mayoritas petani daerah tersebut memiliki lahan sendiri dan dikelola pribadi.	0,12	3	0,37
4	Ketersediaan bibit kopi	0,14	4	0,54
	Subtotal	0,53		1,86
	Faktor Kelemahan (*Weakness*)			
1	Kurangnya pengetahuan petani akan perawatan tanaman kopi	0,11	3	0,32
2	Permodalan untuk menunjang usaha relatif minim	0,14	3	0,41
3	Penanaman yang masih sederhana dan tekhnik panen yang kurang selektif membuat banyaknya kualitas kopi yang tidak seragam.	0,13	2	0,23
4	Aksesbilitas yang susah dijangkau	0,11	2	0,23
	Subtotal	0,48		1,18
	Total Kekuatan dan Kelemahan (S+W)	**1,00**		**3,05**
	Selisih Kekuatan dan Kelemahan (S-W)	**0,03**		**0,68**

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Setelah analisis faktor internal, selanjutnya terdapat hasil dari identifikasi faktor-faktor eksternal yang tertulis kedalam *Matriks External Factor Analysis Summary* (EFAS) sebagai berikut:

Tabel 2. Matriks Analisis Faktor Eksternal (EFAS)

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
	Faktor Peluang (*Opportunity*)			
1	Tingginya kebutuhan konsumen kopi sehingga permintaan meningkat	0,23	3	0,68
2	Adanya lahan yang tersedia banyak dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan lain, seperti ketela, jagung, alpukat.	0,31	4	1,23
	Subtotal	0,53		1,91
	Faktor ancaman (*Threat*)			

1	Perubahan cuaca dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas kopi	0,21	3	0,63
2	Munculnya penyakit dapat menggangu pertumbuhan tanaman kopi.	0,26	3	0,77
Subtotal		0,47		1,40
Total peluang dan ancaman (O+T)		**1,00**		**3,31**
Selisih peluang dan ancaman (O-T)		**0,07**		**0,51**

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Penyusunan strategi pengembangan kawasan berbasis kopi di Desa Lambeji Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari mengacu pada hasil IFAS-EFAS. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuatan (*strength*) memiliki subtotal sebesar 1,86; kelemahan (*weakness*) memiliki subtotal bernilai 1,18; dan untuk peluang (*opportunity*) memiliki nilai subtotal 1,91; serta ancaman (*threat*) memiliki subtotal 1,40. Dalam posisi kuadran strategi pengembangan kawasan berbasis kopi di Desa Lambeji Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari digambarkan dalam konsep penentuan sumbu eksternal = O - T = 1,91 - 1,40 = 0,51 dan sumbu faktor internal = S - W = 1,86 - 1,18 = 0,68 Dilihat dari hasil matriks tersebut menunjukkan bahwa strategi pengembangan kawasan berbasis kopi di Desa Lambeji Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari terletak di koordinat (0,51;0,68) yaitu pada kuadran I yang digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

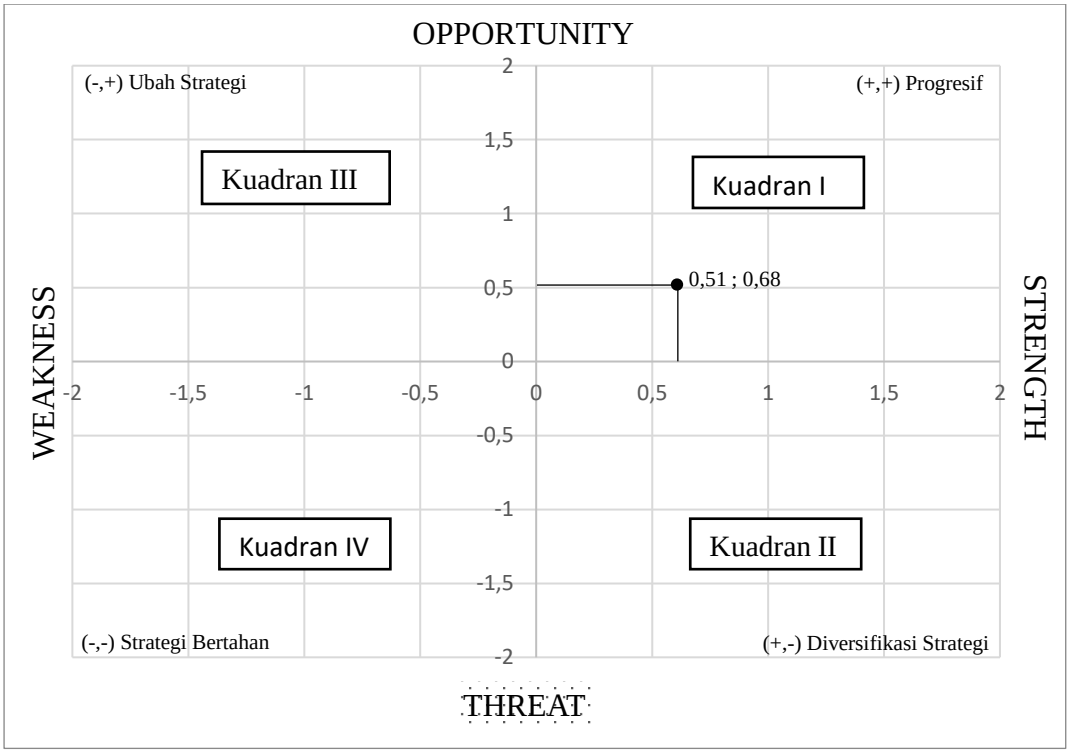

Gambar 1. Kuadran Hasil Analisis SWOT
Sumber: Microsoft Excel, Olahan Sendiri, 2024

Pembahasan

Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada pengembangan kawasan berbasis kopi di Desa Lambeji Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari

Berdasarkan Faktor Internal dan juga Faktor Eksternal pada tabel 4.1 dapat dijelaskan lebih rinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan berbasis kopi di Desa Lambeji

Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, baik yang termasuk dalam elemen kekuatan dan kelemahan, peluang serta ancaman sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strength)
    1. Luas lahan yang tersedia menjadi pendukung
    2. Kondisi tanah yang subur membuat tanaman kopi tumbuh dengan baik
    3. Mayoritas petani daerah tersebut memiliki lahan sendiri dan dikelola pribadi
    4. Ketersediaan bibit kopi merupakan faktor penting dalam pengembangan usaha kopi. Dengan tersedianya bibit kopi yang berkualitas mampu menghasilkan kualitas kopi yang bagus juga.
b. Kelemahan (Weakness)
    1. Kurangnya pengetahuan petani akan perawatan tanaman kopi. Hal ini akan berimbas pada kualitas kopi serta kondisi lahan pertanian. Untuk meningkatkan produksi serta budidaya tanaman kopi yang benar perlu adanya dukungan tenaga penyuluh yang nanti akan membantu petani kopi dalam pembudidayaan tanaman kopi.
    2. Permodalan untuk menunjang usaha relatif minim. Modal usaha merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan usaha. Pasalnya jika modal usaha tidak dimiliki petani, maka usahanya tidak akan berjalan. Biasanya, permodalan dapat diperoleh dari pribadi, atau bisa juga melalui pinjaman non-lembaga seperti keluarga, saudara, teman, dan sebagainya. Namun, petani lebih banyak memperoleh dari hasil penjualan produksi kopi yang dimiliki kepada pedagang pengumpul.
    3. Penanaman yang masih sederhana dan tekhnik panen yang kurang selektif membuat banyaknya kualitas kopi yang tidak seragam. Ini juga berdampak terhadap waktu yang terpakai. Dalam hal ini diperlukannya penggunaan tehnologi pada proses pengembangan usaha seperti mesin gilingan kopi, pebukur kadar air, dan sebagainya agar dapat mendukung kinerja menjadi lebih efisien dan efektif.
    4. Aksesbilitas yang susah dijangkau dapat menghambat dalam produktivitas kopi. Kondisi jalan yang hanya setapak, belum lagi saat musim hujan yang bisa mengakibatkan jalan menjadi rusak dapat membahayakan petani yang nantinya akan pergi ke ladang untuk bekerja. Hal inilah yang terkadang membuat para petani kopi enggan untuk bercocok tanam ke ladang.
c. Peluang (Opportunity)
    1. Tingginya kebutuhan konsumen kopi sehingga permintaan meningkat. Bukan hal yang mengagetkan jika saat ini minuman kopi menjadi suatu kebiasaan yang harus dilakukan setiap harinya. Hasil produksi kopi yang menjanjikan ini bermula pada bibit kopi yang berkualitas. Semakin bibit ini memiliki kualitas yang bagus, maka permintaan semakin meningkat.
    2. Adanya lahan yang tersedia banyak dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan lain, seperti ketela, jagung, alpukat. Selain memanfaatkan lahan yang subur, dengan waktu pertumbuhan tanaman yang berbeda – beda, hal ini dilakukan guna mendapatkan pendapatan khususnya pendapatan sehari-hari petani.
d. Ancaman (Threat)
    1. Perubahan cuaca dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas kopi. Perubahan cuaca yang tidak menentu seperti saat kopi berbunga pada cuaca yang kering dapat merusak bunga kopi.
    2. Munculnya penyakit dapat menggangu pertumbuhan tanaman kopi.

Strategi pengembangan kawasan berbasis kopi di Desa Lambeji Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari

Berdasarkan dari hasil kuadran dari analisis internal dan eksternal, maka dilakukan penggabungan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan menggunakan matriks SWOT. Hal ini bertujuan untuk menentukan alternatif strategi yang akan dipilih dalam pengembangan kawasan berbasis kopi di Desa Lambeji Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari. Kombinasi faktor strategis internal dan eksternal akan menentukan strategi yang diabgi menjadi 4 bagian, yaitu strategi SO (Strength-Opportunity), WO (Weakness-Opportunity), ST (Strength-Threat), WT (Weakness-Threat) yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks SWOT

IFAS / EFAS	Kekuatan (*Strength* = S)
	1. Luas lahan yang tersedia menjadi pendukung. 2. Kondisi tanah yang subur membuat tanaman kopi tumbuh dengan baik. 3. Mayoritas petani daerah tersebut memiliki lahan sendiri dan dikelola pribadi. 4. Ketersediaan bibit kopi
Peluang (*Opportunity* = O)	Strategi SO
1. Tingginya kebutuhan konsumen kopi sehingga permintaan meningkat 2. Adanya lahan yang tersedia banyak dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan lain, seperti ketela, jagung, alpukat.	1. Penyediaan suplai bibit kopi berkualitas yang dilakukan dalam pengembangan usaha kopi. 2. Memanfaatkan kondisi lahan yang subur dengan kopi yang berkualitas guna memenuhi permintaan konsumen kopi yang meningkat. 3. Peningkatan diversifikasi pendapatan khususnya tambahan pendapatan harian dengan adanya upaya pengoptimalan lahan.

Sumber: Data Primer 2024

Mengacu pada tabel hasil identifikasi matriks SWOT maka dirumuskan strategi pengembangan kawasan berbasis kopi di Desa Lambeji Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember yang menghasilkan tujuh strategi dari faktor- faktor internal dan eksternal kawasan berbasis kopi di Desa Lambeji sebagai berikut:

Strategi S-O

Strategi ini menggunakan kekuatan dan peluang, yaitu mengoptimalkan seluruh kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal yaitu:

a. Penyediaan suplai bibit kopi berkualitas yang dilakukan dalam pengembangan usaha kopi.
b. Memanfaatkan kondisi lahan yang subur dengan kopi yang berkualitas guna memenuhi permintaan konsumen kopi yang meningkat.
c. Peningkatan diversifikasi pendapatan khususnya tambahan pendapatan harian dengan adanya upaya pengoptimalan lahan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan di bab 4, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu:

a. Faktor menjadi kekuatan yaitu keadaan geografis yang memadai, pengelolaan lahan secara pribadi, ketersediaan bibit kopi. Sedangkan faktor kelemahan yaitu wawasan petani yang rendah, tehnik tanam yang sederhana, modal usaha yang minim, serta aksesbilitas yang susah dijangkau. Faktor - faktor strategis eksternal yang menjadi faktor peluang adalah pemanfaatan lahan dengan menanam tanaman selain kopi. Sedangkan faktor yang menjadi ancaman yaitu perubahan cuaca yang tidak menentu dapat menghambat pertumbuhan dan kualitas kopi, munculnya penyakit dapat menggangu pertumbuhan tanaman kopi.
b. Strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan kawasan berbasis kopi di Desa Lambeji Pegunungan Mandigu adalah penyediaan suplai bibit kopi berkualitas yang dilakukan dalam pengembangan usaha kopi, memanfaatkan kondisi lahan yang subur dengan kopi yang berkualitas guna memenuhi permintaan konsumen kopi yang meningkat, peningkatan diversifikasi pendapatan khususnya tambahan pendapatan harian dengan adanya upaya pengoptimalan lahan

Daftar Pustaka

Amirullah. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Badan Pusat Statistika. 2023. “Produksi Perkebunan Kopi Di Jawa Timur.” https://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/105.

Farah, A. 2012. “Coffe Constituents in Coffee : Emerging Health Effect and Disease Revention.” *In Blacwell Publishing Ltd*. https://www.ift.org/-/media/KnowledgeCenter/Publications/Books/Samples/IFTPressBook_Coffee_PreviewChapter.pdf.

Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakrta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kosasih. 2017. “Perencanaan Strategi Pemasaran Online Untuk End-User Pant of Shoes Berdasarkan Swot.” *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis* 2.

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugraha, Listyawati Ardi. 2011. *Pengaruh Modal Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rismunandar, dan Paimin. 2011. “Kayu Manis Budidaya Dan Pengolahan.” *penebar Swadaya, SUrabaya*.

Schuler, R. 1992. “Strategic Human Resource Management: Linking the People With the Strategic Needs of the Business.” *Organizational Dynamics, Summer*: 18–31.

Sugiarto. 2007. *Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Utami, Jamhari, dan Suhatmi Hardyastuti. 2011. "EL Nino, La Nina Dan Penawaran Pangan Di Jawa, Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12:2: 257–71.

Yuhono, J.T dan Djaenudin. 2009. "Penerapan Sistim Nilai Cacat (*Defect System*) Dan Citarasa Kopi Upaya Peningatan Mutu Kopi Di Provinsi Lampung Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan Bandar Lampung." *Penelitian Sosial Ekonomi*.

Analisis Kemiskinan Jawa Timur

Husniatul Hoiroh [a,1,*], Aisah Jumiati [b,2], Teguh Hadi Priyono [c,3] , Moh. Adenan[d,4], Lilis Yuliati[e,5], Ciplis Gema Qori'ah[f,6]

[a,b,c,d,e] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember
[1]husniahoiro632@gmail.com *; [2]aisahjumiati@gmail.com ; [3]teguh_hadipriyo@yahoo.com; [4]mohadenan.feb@unej.ac.id ; [5]lilisyuliati.feb@unej.ac.id; [6]ciplis.qoriah@gmail.com
* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history
Received May 2024
Revised May 2024
Accepted May 2024

ABSTRACT

Poverty is a sensitive and crucial problem in every country, especially in developing countries like Indonesia. East Java has been the province with the highest number of poor people in Indonesia for several years. This research aims to determine the effect of income inequality, education level and economic growth on poverty in 36 districts/cities in East Java. The method used in this research is panel data analysis, and the data used is secondary data. The research results show that the inequality variable has a positive and significant effect on poverty in East Java, education level has a negative and significant effect on poverty in East Java, and economic growth has a negative and significant effect on poverty in East Java.

Keywords
Poverty, Economic Inequality, Education, Economic Growth

1. Pendahuluan

Kemiskinan termasuk masalah sensitif dan krusial di tiap negara, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan menjadi permasalahan sosial laten dan aktual yang terjadi di tengah masyarakat (Rahayu et al., 2021). Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai keadaan ketika individu atau sekelompok individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Teori mengenai kemiskinan secara umum berasal dari dua paradigma yakni neo-liberal dan demokrasi-sosial. Dua paradigma ini mempunyai perbedaan mencolok dalam melihat kemiskinan. Individu dan pasar bebas adalah fokus utama dalam paradigma neo-liberal. Dalam perspektif neo-liberal, kemiskinan diinterpretasikan sebab akibat dari pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Sedangkan, dalam paradigma demokrasi, kemiskinan dianggap sebagai persoalan struktural. Menurut pandangannya, ketidakadilan dan ketimpangan yang ada di dalam masyarakat merupakan penyebab utama kemiskinan (Thahir et al., 2021).

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan luas terbesar di Indonesia memiliki berbagai peluang dan tantangan dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi. Meskipun telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek, masalah seperti kemiskinan juga tidak dapat terhindarkan. Jawa Timur juga dinobatkan menjadi provinsi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada tahun 2022, PDRB Jawa Timur telah mencapai 2.730.970,09 miliar rupiah. Provinsi Jawa Timur juga memiliki kontribusi yang cukup tinggi dengan memberikan kontribusi sebesar 14,36% terhadap PDRB Nasional pada tahun 2022 (BPS, 2022). Akan tetapi, pada sisi lainnya angka kemiskinan di Jawa Timur tergolong tinggi, di mana pada tahun 2022 mencapai 4.236,51 juta jiwa dan menjadi wilayah dengan kemiskinan terbesar di Indonesia. Sehingga walaupun data menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya, tetapi kenaikan pertumbuhan ekonomi ini tidak sejalan dan tidak diimbangi dengan penurunan kemiskinan yang signifikan (Muslihatinningsih & Abidin, 2022).

Tabel 1.1 Lima Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar di Indonesia tahun 2022

No.	Provinsi	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
1.	Jawa Timur	4236,51
2.	Jawa Barat	4053,62
3.	Jawa Tengah	3858,23
4.	Sumatera Utara	1262,09
5.	Nusa Tenggara Timur	1149,17

Salah satu faktor kunci yang menjadi perhatian dalam studi mengenai kemiskinan adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan dapat berkontribusi pada kemiskinan, karena ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat menghasilkan sebaran pendapatan yang sangat tidak merata yang akhirnya mendorong terciptanya kemiskinan. Hal ini menyebabkan sebagian besar sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok, sementara sebagian besar penduduk miskin mendapat manfaat yang sangat terbatas. Ketidakmerataan dalam distribsui pendapatan dapat memperbesar angka kemiskinan, demikian pula sebaliknya. Ketika ketidakmerataan distribusi pendapatan rendah, maka angka kemiskinan juga akan mengalami penurunan (Oktaviani et al., 2022)

Di sisi lain, tingginya angka kemiskinan pada suatu negara juga dapat dipengaruhi oleh kualitas dari sumber daya manusianya. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas, yang kemudian berpengaruh pada pendapatan yang rendah. Akibatnya, jumlah penduduk miskin pada gilirannya akan meningkat seiring dengan menurunya pendapatan. Untuk meningkatkan kualitas manusia, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah lewat pendidikan. Melalui

pendidikan, pengetahuan dan keterampilan seseorang akan bertambah, sehingga diharapkan mendorong peningkatan produktivitas yang pada gilirannya akan terjadi peningkatan kesejahteraan (Zaqiah et al., 2023)

Sebagian besar ahli ekonomi, menyatakan bahwa ada keterkaitan erat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Hal ini dikarenakan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong banyaknya lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran, sehingga angka kemiskinan pada gilirannya akan berkurang (Susanto & Pangesti, 2019). Sukirno (2013) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat yang diperlukan bagi pengurangan kemiskinan. Akan tetapi, untuk mencapai hal tersebut, pertumbuhan tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini berarti bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut haruslah dapat dinikmati oleh semua golongan, termasuk golongan penduduk miskin di dalamnya. Terdapat gap dalam beberapa kajian yang sudah dilakukan terkait dengan fenomena faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan, di antaranya yaitu penelitian Khoirun dan Nisa (2022) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Restu (2020) yang mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan dan positif dengan kemiskinan. Penelitian Surbakti et al (2022) menemukan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan dan positif pada kemiskinan. Sedangkan penelitian Sinaga et,al menyatakan pendidikan mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan. Penelitian Rosidatul dan Indah (2021) menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan dalam penelitian Faisal dan Darwin (2023) menyatakan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan dan berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan.)

2. Tinjauan Pustaka

Teori Kemiskinan

Teori kemiskinan bermuara pada dua paradigma yakni paradigma neo-liberal dan demokrasi-sosial. Kedua paradigma ini melihat kemiskinan dari sudut pandang yang berbeda. Dalam paradigma neo-liberal fokus utama dalam melihat kemiskinan ialah pasar bebas dan individu. Pendekatan neo liberal menyoroti kebebasan individu dalam masyarakat. Dalam perspektif ini kemiskinan dianggap sebagai masalah pribadi yang muncul karena pilihan-pilihan yang dibuat oleh individu itu sendiri. Selain itu, paradigma in menganggap bahwa kekuatan pasar menjadi faktor kunci dalam menangani permasalahan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena melalui kekuatan pasar yang diperkuat akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga pada gilirannya diharapkan dapat menghapuskan kemiskinan. Sedangkan dalam Paradigma demokrasi sosial adalah paradigma yang menganggap kemiskinan sebagai permasalahan struktural. Menurut pandangannya, kemiskinan disebabkan oleh ketidakadilan dan ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh akses terhadap sumber daya yang terbatas bagi kelompok tertentu, sehingga pada akhirnya menyebabkan kemiskinan. Teori ini menekankan bahwa kesetaraan adalah syarat utama untuk mencapai kemandirian dan kebebasan. Hal ini dapat dicapai jika semua orang memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mencapai dan mengembangkan potensi yang dimiliki, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Kebebasan bebas yang dimaksud tidak hanya mencakup kebebasan dari pengaruh luar, akan tetap maksudnya adalah bebas menentukan pilihan. Maka, peran negara dalam hal ini dianggap penting sebagai jaminan bahwa setiap individu dapat berpartisipasi.

Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi ketika terjadi diferensiasi dalam pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat, dan menyebabkan ketidaksamaan dalam pembagian pendapatan nasional di antara masyarakat (Todaro dan Smith, 2006). Douglas C. North adalah orang pertama yang membahas konsep ketimpangan dalam analisnya mengenai teori pertumbuhan neoklasik yang kemudian dikenal

dengan hipotesa neo klasik. Dalam teorinya, ia mengemukakan bahwa ketimpangan regional akan meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Proses ini tidak akan berhenti sampai mencapai puncaknya. Namun, ketimpangan pembangunan akan mulai berkurang atau mengalami penurunan, jika proses pembangunan berlanjut. Ketimpangan dan kemiskinan memiliki hubungan yang saling terkait, karena adanya ketimpangan dapat memperburuk kemiskinan dan kemiskinan dapat dianggap sebagai bentuk kesenjangan (Khoirun et al, 2020). Teori Ragnar Nurkse menyatakan bahwa kemiskinan muncul karena ketidakadilan dalam bagaimana sumber daya terbagi, yang pada akhirnya menyebabkan ketidaksamaan pada distribusi pendapatan. Orang yang tergolong miskin mempunyai akses terbatas dan kualitas sumber daya yang rendah. Hal ini mendorong orang dengan pendapatan rendah atau kategori miskin memiliki akses dan peluang terbatas dalam berbagai hal seperti akses pendidikan, akses kesehatan, peluang pekerjaan yang layak. Sehingga dapat berimbas pada memburuknya kondisi masyarakat yang berada di bawah kemiskinan (Sari & Putri, 2022).

Teori Pendidikan

Menurut Susanto dan Pangesti, pendidikan adalah kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu karena mereka yang memiliki pendidikan yang baik atau terdidik akan memiliki kesempatan menghindari kemiskinan (Netri, 2023). Pendidikan mampu meningkatkan kecerdasan atau intelegensi masyarakat dan berpengaruh pada kemampuan suatu, negara dalam menguasai dan mengadaptasi teknologi baru, serta meningkatkan kapabilitas produksi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pendidikan dianggap sebagai aset penting dalam pembangunan modal manusia. Menurut Becker (1975) menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas dan keterampilan kerja dengan tujuan guna mengurangi tingkat kemiskinan di sebuah negara. Pendidikan baik formal maupun non formal sangat penting di dalam pengurangan angka kemiskinan secara jangka panjang. Hal ini mampu terjadi, karena secara tidak langsung menciptakan peningkatan efisiensi dan produktivitas pada umumnya, serta secara tidak langsung melalui adanya pelatihan keterampilan bagi kelompok miskin akan berguna dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka (Lincolin, 1999).

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara dalam jangka panjang dalam menyediakan berbagai barang ekonom kepada penduduknya, seiring dengan berkembang pesatnya kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi dalam teori Kuznet berkorelasi kuat dengan kemiskinan. Dalam teorinya, pada awal proses pembangunan ekonomi akan menyebabkan kecenderungan pada memburuknya distribusi pendapatan dan berimbas pada peningkatan kemiskinan. Akan tetapi, pada tahap akhir akan terjadi pendistribusian pendapatan yang membaik, sehingga secara bekelanjutan kemiskinan juga akan mengalami penurunan.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi Pemerintah Republik Indonesia yaitu Badan Pusat Statistik Indonesia. Untuk data disini menggunakan data panel yang merupakan penggabungan dari data *time series* dari 2013 hingga 2022 dan data *cross section* sebanyak 36 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian untuk menguji pengaruh variabel Ketimpangan Pendapatan (GINI), Tingkat Pendidikan(RLS), Pertumbuhan Ekonomi(GWR) terhadap variabel terikat Ketimpangan Pendapatan sebagai berikut

$$PVR_{it} = \beta_0 + \beta_1 GINI_{it} + \beta_2 EDC_{it} + \beta_3 GWR_{it} + \varepsilon_{it}$$

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi dari Uji Hausman, nilai probabilitas adalah sebesar 0.0000. Jika nilai probabilitas dibandingkan dengan nilai kritis atau alfa (… = 10% = 0.1), maka hasil menunjukkan jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.1, dapat disimpulkan jika model terbaik adalah *Fixed Effect Model (FEM)*

Tabel 4.1 Hasil Uji Regresi Panel Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	39.69214	1.868495	21.24284	0.0000
GINI	1.789871	1.089201	1.643288	0.1013
EDC	-0.347565	0.162248	-2.142178	0.0329
LOG_GWR	-5.953098	0.641900	-9.274187	0.0000

Hasil estimasi regresi data panel dengan Fixed Effect Model dapat dijelaskan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

PVR = 39.6921364 + 1.789871GINIit - 0.347565 EDCit - 5.953098 GWRit + eit

Berdasarkan persamaan tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 39.69214 merupakan besarnya nilai tingkat kemiskinan jika jumlah ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi bernilai konstan, bahwasanya apabila rasio ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0 maka tingkat kemiskinan sebesar 39.69214.
2. Hasil uji variabel ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa berkoefisien positif yakni 1.789871. Hasilnya menunjukkan bahwa ketika ketimpangan pendapatan meningkat sebesar satu indeks maka tingkat kemiskinan pada 36 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur akan meningkat pula sebesar 1.789871 persen
3. Hasil uji variabel tingkat pendidikan diperoleh nilai koefisien yang bernilai negatif sebesar 0.347564953. Hal tersebut diartikan, bahwa ketika terjadi peningkatan pada tingkat pendidikan sebesar satu tahun maka tingkat kemiskinan pada 36 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur akan mengalami penurunan sebesar 0.347565 persen.
4. Hasil uji variabel pertumbuhan ekonomi, ditemukan bahwa nilai koefisien bernilai negatif sebesar 5.953098. Hal ini berati bahwa ketika terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi sebesar satu miliar rupiah, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di 36 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 5.953098 persen.

Pembahasan

1. Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya bahwa ketika ketimpangan naik maka kemiskinan juga akan naik. Teori Ragnar Nurkse sejalan dengan masalah tersebut, di mana menerangkan bahwa ketimpangan menyebabkan penduduk yang berada di bawah kemiskinan memiliki keterbatasan dalam akses sumber daya dan permasalahan pada kualitasnya yang rendah. Pengaruh ini mendorong orang dengan pendapatan rendah atau kategori miskin memiliki akses dan peluang terbatas dalam berbagai hal seperti akses pendidikan, akses kesehatan, peluang pekerjaan yang layak. Sehingga akan berimbas pada memburuknya kondisi masyarakat yang berada di bawah kemiskinan. Ketimpangan pendapatan juga dapat dilihat sebagai cerminan untuk melihat kemerataan atau ketimpangan tingkat pendapatan, di mana hal tersebut adalah penentu utama dari kemiskinan. Hal ini mengindikasi bahwa secara tidak

langsung ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh menurunnya tingkat pendapatan mengakibatkan kelompok penduduk yang di awalnya memiliki pengeluaran rata-rata dia atas garis kemiskinan menuju pengeluaran rata-rata di bawah garis kemiskinan. Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan (Suparman et al., 2021) dan (Aedy et al., 2023) yang menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan antara ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan Hal tersebut memberikan makna bahwa masalah ketimpangan pendapatan tidak boleh diabaikan didalam pembangunan.

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan

Berdasarkan pengolahan data diperoleh bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya bahwa ketika tingkat pendidikan naik maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Hal sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Becker yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dalam jangka panjang dapat meningkatkan partisipasi individu dalam perkembangan perekonomian, sehingga akan terjadi peningkatan pada pendapatan per kapita masyarakat. Melalui peningkatan pendapatan per kapita, jumlah masyarakat miskin dalam suatu daerah juga akan berkurang. Pendidikan juga dapat meningkatkan peluang dan kesempatan kerja yang semakin besar, sehingga dengan demikian individu akan lebih mudah menaikkan derajat kemakmurannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar pula peluang dalam memperoleh pekerjaan yang layak karena memenuhi kualifikasi dalam keterampilan dan juga wawasan. Apabila seorang individu memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga wawasannya juga akan rendah. Hal ini menjadikan individu tersebut tidak mampu bersaing dengan yang lain yang masuk kategori menempuh pendidikan yang tinggi. Hal ini kemudian akan berujung pada kondisi pengangguran dan meningkatnya kemiskinan karena tidak adanya pendapatan yang diperoleh (Tjiabrata et al., 2021). Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Suparman et al., 2021), (Nisa et al., 2020), (Aedy et al., 2023), (Dongoran et al., 2023), (Faritz & Soejoto, 2020), (Sinaga et al., 2024) juga menemukan hasil yang sejalan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan dan hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya bahwa, ketika ketimpangan pendapatan naik, maka akan berpengaruh pada meningkatnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Berdasarkan pengolahan data diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, artinya bahwa ketika pertumbuhan naik maka akan mengurangi tingkat kemiskinan. Berbagai penelitian ekonomi menunjukkan bahwa ada peran penting yang dimiliki oleh pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang pada pengurangan kemiskinan. Tujuan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari upaya pada pemerataan distribusi pendapatan dan terus mendorong upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menekankan meratanya distribusi pendapatan harus dipisahkan sebagai tujuan pembangunan. Teori Kuznet juga mendukung hal ini, dengan menyatakan bahwa di awal pertumbuhan ekonomi, akan terjadi kecenderungan buruknya distribusi pendapatan dan mengakibatkan naiknya angka kemiskinan. Namun akan kondisi ini akan membaik seiring dengan tahap-tahap selanjutnya dan secara tidak langsung akan mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi penting juga untuk memperhatikan proses pemerataan, sehingga manfaat atau capaian pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk golongan miskin di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dijadikan patokan dalam melihat perkembangan perekonomian dari sebuah negara dan menilai bagaimana kinerja pembangunan yang dilakukan. Sehingga secara tidak langsung dapat diartikan bahwa ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi berarti akan terjadi peningkatan produksi yang dihasilkan. Hal ini akan mendorong terjadinya penyerapan tenaga kerja yang kemudian akan berdampak pada menurunnya angka pengangguran dan pada gilirannya akan menurunkan tingkat kemiskinan (Mankiw, 2005).Penelitian (Susanto & Pangesti, 2020), (Evita & Primandhana, 2022), (Suparman et al., 2021) juga menemukan hasil yang sama yaitu adanya pengaruh signifikan dan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data terhadap 36 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kemiskinan di 36 Kabupaten/Kota Jawa Timur. Meningkatnya ketimpangan pendapatan berpengaruh pada peningkatan kemiskinan
2. Pendidikan memiliki hubungan yang negatif dan pengaruh signifikan pada kemiskinan di 36 Kabupaten/Kota Jawa Timur. Penyebabnya adalah melalui pendidikan akan menyebabkan adanya peningkatan sumber daya manusianya dalam hal kualitas dengan ditandai oleh meningkatnya keterampilan dan wawasan yang nantinya bisa memperbesar akses peluang mendapatkan pekerjaan yang diimbangi dengan meningkatnya pendapatan.
3. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan dengan kemiskinan di 36 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Penyebabnya karena pertumbuhan ekonomi secara langsung mendorong aktivitas perekonomian, sehingga pendapatan dari masyarakat juga akan mengalami peningkatan

Daftar Pustaka

Aedy, H., Saenong, Z., Tajuddin, Alwi, S., & Barani, L. O. S. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Progress Ekonomi Pembangunan*, *8*(1), 82–95.

Aini, S. N., & Nugroho, R. Y. Y. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, *4*(1). https://doi.org/10.21107/bep.v4i1.19474

Amponsah, M., Agbola, F. W., & Mahmood, A. (2023). The relationship between poverty, income inequality and inclusive growth in Sub-Saharan Africa. *Economic Modelling*, *126*(June), 106415. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106415

Dongoran, F. R., Sulfina, S. D., Syah, S. A., & Siahaan, T. (2023). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, *1*(2), 198–207. https://doi.org/10.47233/jemb.v1i2.671

Evita, M. J., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Blora. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *10*(1), 79–88.

Faritz, M. N., & Soejoto, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, *8*(1), 15–21. https://doi.org/10.26740/jupe.v8n1.p15-21

Indrawati, I., Ermawati, E., & Istiqamah, R. (2019). Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderating di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *1*(2), 39–69.

Irawan, E. (2022). The Effect of Unemployment, Economic Growth, and Human Development Index on Poverty Levels in Sumbawa Regency in 2012-2021. *International Journal Od Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, *6*(2), 95–957. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR

Irma Lismana, A., & Sumarsono, H. (2022). Analysis of the Effect of Population Growth, Human Development Index and Unemployment Rate on Poverty in West Java Province 2017-2020. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 20, Issue 01).

Ise, N. F., Kawung, G. M. V., & Rorong, I. P. F. (2022). Pengaruh Inflasi dan Penganggurann Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Periode 2007-2020. *Jurnal Berkala Imiah Efisiensi*, *22*(6), 97–108.

Ishak, R. A., Zakaria, J., & Arifin, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. *PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi*, *3*(2), 41–53. https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i2.463

Izza, Muhammad Alfin Syaiful Fitri Wachdah, F. L., & Yasin, M. (2023). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, *1*(3), 42–50. https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1122

Mansyur, K., Nursini, & Hamrullah. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, *1*(2), 79–107. https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/

Muslihatinningsih, F., & Abidin, J. (2022). Analisis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekuilibrium*, *2*(4), 132–147.

Nadya, I., & Aimon, H. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN : Peran Teknologi Informasi, Pendidikan dan Investasi Asing. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, *9*(2), 103–113. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains

Netri, N. N., Kawung, G. M. ., & Siwu, H. F. D. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *23*(6), 97–108.

Nisa, K., Wulandari, A., & Rahayu, R. L. (2020). Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018. *SOROT*, *15*(1), 55. https://doi.org/10.31258/sorot.15.1.55-63

Oktaviani, N., Rengganis, S. P., & Dermawan, D. (2022). Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *1*(3), 176–189.

Putri, R. H. N., & Yuliana, I. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dengan pengangguran sebagai mediasi di Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(6), 2691–2700. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue

Rahayu, H. C., Purwantoro, & Setyowati, E. (2021). Measuring the Effect of Inequality and Human Resource Indicators to Poverty Density in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, *22*(2), 153–160. https://doi.org/10.23917/jep.v22i2.13631

Sari, W. M. W., & Putri, D. Z. (2022). Analisis Korelasi antara Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, *11*(2), 90. https://doi.org/10.24036/ecosains.12071457.00

Seleky, S., Mulyo, J. H., & Seleky, R. N. (2016). Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Bojonegoro. *Agro Ekonomi*, *26*(2), 115. https://doi.org/10.22146/agroekonomi.17264

Siadari, F. A., & Damanik, D. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. *JKA: Jurnal Kendali Akuntansi*, *1*(3), 47–58.

Sinaga, R., Kumenaung, A. G., & Rorong, I. P. (2024). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *25*(1), 50–67.

Sinta, & Fahrati, E. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Perkapita, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2019. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *4*(1), 81–97.

Suparman, Muzakir, Wahyuningsih, & Tallesang, M. (2021). Economic Growth, Income Inequality, and Poverty in Central Sulawesi. *Budapest International Research and Critics Intitute-Journal (BIRCI-Journal)*, *4*(4), 14117–14125. https://doi.org/10.2139/ssrn.4080484

Surbakti, S. P. P., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2021. *Ecoplan*, *6*(1), 37–45. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.631

Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, *5*(4), 340. https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4183

Susanto, R., & Pangesti, I. (2020). Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Applied Business and Ekconomics (JABE)*, *7*(2), 271–278.

Thahir, M. I., Semmaila, B., & Arfah, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Takalar. *Journal of Management Science (JMS)*, *2*(1), 61–81. https://doi.org/10.52103/jms.v2i1.323

Tjiabrata, A., Engka, D. S. M., & Rompas, W. F. I. (2021). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *21*(7), 90–101. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/38122/34846

Zaqiah, A., Triani, M., & Yeni, I. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, *5*(3), 33. https://doi.org/10.24036/jkep.v5i3.15284

PENGARUH PDRB, INVESTASI, DAN AGLOMERASI TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Musyrifah [a,1,*], Edy Santoso[b,2], Zainuri[c,3], Inayah Swasti Ratih[d,4], Abdul Fatah[e,5], Bahrina Almas[f,6]

[A,b,c,d,e,f] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jalan Kalimantan No 37, Jember 68121, Indonesia

[1]rifaahh01@gmail.com; [2]edysantoso@unej.ac.id; [3]zainuri.feb@unej.ac.id; [4]inayahswasti.feb@unej.ac.id; [5]ab.fath87@gmail.com; [6]almas.eksyarfeb@unej.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history
Received December 2023
Revised March 2024
Accepted May 2024

ABSTRACT

The success of a development can be seen from the conditions of uneven economic development in the scope of society, which results in development inequality between developed and underdeveloped regions. This study aims to analyze the effect of GRDP, investment, and agglomeration on development inequality between regions in East Kalimantan Province. The data source of this research is secondary data from 2017 to 2021, which comes from the Central Bureau of Statistics of East Kalimantan Province. The analysis method used in this research is a quantitative approach using panel data regression analysis. Panel data analysis using the Fixed Effect Model, which is the best model for processing data in this study, shows that GRDP has a negative and significant effect, then investment has a positive and insignificant effect, and agglomeration has a positive and significant effect on development inequality between regions in East Kalimantan Province.

Keywords
GRDP, Investment, Agglomeration, Development Inequality

1. Pendahuluan

Dalam proses pembangunan di suatu wilayah seharusnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan yang harus dicapai secara bersama. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yangumum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini disebabkan dari adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini yang membuat kemampuan suatu wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda dan maka dari itu tidak mengherankan jika pada setiap daerah akan terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang. Terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang bersangkutan, biasanya implikasi ini ditimbulkan dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang nantinya akan berlanjut dengan implikasi politik dan ketenteraman masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini perlu ditanggulangi melalui formasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketimpangan antar wilayah ini bukan hanya dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografi, tingkat pendapatan, dan jumlah penduduk tetapi juga bisa dikarenakan beberapa faktor lain seperti PDRB, investasi, dan aglomerasi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi yang di dalamnya terdapat 7 kabupaten dan 3 kota,provinsi ini merupakan provinsi yang menjadi penyumbang hampir 50% perekonomian di Pulau Kalimantan, provinsi ini yang di dalamnya memiliki banyak sekali potensi baik dalam segi sumber dayaalam dan ekonomi. Permasalahan yang kemudian muncul adalah dampak dari adanya perbedaan hasil pembangunan baik secara ekonomi maupun non ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya, hal ini yang kemudian menyebabkan adanya tingkat pembangunan antar wilayah yang tidak merata dan jugahal ini terjadi akibat dari adanya perbedaan dalam unsur kegiatan ekonomi baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun dari hasil PDRB, investasi, dan aglomerasinya. Oleh karenanya diharapkan kinerja pembangunan ekonomi yang baik ini dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Atas dasar hal-hal yang dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari PDRB, investasi, dan aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017-2021.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Ketimpangan antar wilayah ini dimunculkan oleh Doughlas C North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik, menurut Hipotesis Neo Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur ketimpangan pembangunan antar wilayah akan menurun. Neo-Klasik juga berpendapat bahwa mobilitas faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar, sehingga modal dan tenaga ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju dan ketimpangan pembangunan wilayah cenderung melebar. Namun, bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baik sarana dan prasarana, maka mobilitas modal dan tenaga kerja akan semakin lancar. Sehingga, setelah negara tersebut sudah maju, maka ketimpangan

regional secara bertahap akan berkurang.

Teori Simon Kuznets

Simon Kuznets menjadi pelopor dari analisis pola-pola pertumbuhan historis pada negara-negara maju di mana telah menemukan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita, konsep tersebut dikenal dengan konsep Kuznets "U Terbalik" ini mampu memperlihatkan hubungan antara indeks ketimpangan dengan pertumbuhan PDRB. Dalam hipotesis ini mengemukakan bahwa pada awalnya pertumbuhan akan mengalami ketimpangan yang memburuk dan tahap pertumbuhan selanjutnya ketimpangan akan menurun namun PDRB Koefisien Gini pada suatu waktu akan terjadi ketimpangan kembali dan pada akhirnya akan menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut berulang kembali.

Teori Harrod-Domar

Dalam teori investasi Harrod-Domar pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Menurut Harrod-Domar, pembentukan modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Menurut teori ini, untuk meningkatkan laju perekonomian maka diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok tambahan modal.

Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif dan terpusatnya investasi di suatu wilayah, maka ketimpangan distribusi investasi ini dianggap sebagai salah satu faktor utama yang dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan.

Teori Kutub Pertumbuhan (Perroux) dan Pusat Pertumbuhan (Boudeville)

Menurut konsep kutub pertumbuhan yaitu kegiatan ekonomi suatu daerah cenderung beraglomerasi di sekitar pusat-pusat pertumbuhan. Daerah di sekitar kutub pertumbuhan merupakan wilayah yang berpengaruh dan pertumbuhan industri pendorong merupakan pusat dari kutub pertumbuhan, ciri-cirinya yaitu konsentrasi yang tinggi, pengaruh multiplier dan polarisasi yang besar, dan tingkat teknologi yang sudah modern.

Menurut konsep pusat pertumbuhan yaitu suatu kota atau wilayah yang memiliki suatu industri propulsive yang komplek. *Propulsive industries* adalah industri yang mempunyai pengaruh besar baik langsung maupun tidak langsung terhadap semua kegiatan lainnya. Pusat pertumbuhan memiliki karakteristik utama yaitu sekelompok kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu, konsentrasi kegiatan ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya pusat pertumbuhan di suatu wilayah dapat mengakibatkan ketimpangan antar wilayah, apabila pusat pertumbuhan tersebut tidak memberikan dampak terhadap wilayah lain di sekitarnya. Sehingga, proses pertumbuhan dan pembangunan yang tinggi hanya terjadi di wilayah pusat pertumbuhan, sementara wilayah lain yang bukan merupakan pusat pertumbuhan akan memiliki perekonomian yang rendah.

3. Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Variabel yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu variabel dependen yaitu ketimpangan pembangunan antar wilayah dan variabel independen nya yaitu PDRB, investasi, dan aglomerasi. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena data yang digunakan adalah seluruh data dari kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu metode dengan penelitian yang menggunakan data berupa angka yang bermakna kemudian diolah menggunakan statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumber aslinya, namun berasal dari lembaga atau instansi tertentu yang memberikan informasi atau mempublikasikannya.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang akan diolah melalui *software Eviews* untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data panel ini merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section*. Berdasarkan hipotesis dan beberapa studi literatur, variabel yang diduga dapat memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan dalam persamaan linier berikut:

$$DISP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 INVES_{it} + \beta_3 AGLO_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

DISPit = Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

PDRBit = Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota i tahun t

INVESit = Investasi di kabupaten/kota i tahun t

AGLOit = Aglomerasi di kabupaten/kota i tahun t

i = *Cross Section* (Kabupaten/kota)

t = *Time Series* (tahun)

β_0 = Konstanta/ Intersept

β_1, β_2, β_3 = Koefisien regresi pada masing-masing variabel independen

ε = *Error term*

Terdapat beberapa metode dasar yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel, yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Sebelum mengestimasi model penelitian, dilakukan uji spesifikasi untuk menganalisis model mana yang akan digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Uji Chow* dan *Uji Hausman.*

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan (bold, 12 pt)

Hasil Penelitian

Tabel 1. Estimasi Model Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.634118	0.004931	128.6089	0.0000
PDRB	-0.008523	0.000128	-66.81252	0.0000
INVESTASI	0.000174	0.000221	0.788030	0.4347

AGLOMERASI	5.43E-06	1.29E-06	4.213263	0.0001

Pada tabel 1 di atas menunjukkan hasil dari analisis regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model* yang merupakan hasil dari pengaruh variabel PDRB, variabel investasi, dan variabel aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017-2021. Dalam hal ini dapat diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$DISP_{it} = 0{,}634118 - 0{,}008523PDRB_{it} + 0{,}000174INVES_{it} + 0{,}00000543AGLO_{it} + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan hasil dari analisis regresi data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model, hasil tersebut dapat di interpretasikan sebagai berikut:

Konstanta menunjukkan 0,634118 di mana memiliki arti jika PDRB, investasi, dan aglomerasi diasumsikan konstan, maka besar disparitas di provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,634118%.

Variabel PDRB menunjukkan nilai koefisien (-0,008523) yang memiliki arti apabila nilai PDRB naik sebesar 1 juta rupiah, maka akan menurunkan sebesar (-0,008523%) tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur dengan asumsi variabel investasi dan variabel aglomerasi konstan.

Variabel investasi menunjukkan nilai koefisien 0,000174 yang memiliki arti apabila nilai investasi naik sebesar 1 juta rupiah, maka akan meningkatkan sebesar 0,000174% tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur dengan asumsi variabel PDRB dan variabel aglomerasi konstan.

Variabel aglomerasi menunjukkan nilai koefisien 0,00000543 yang memiliki arti apabila nilai aglomerasi naik sebesar 1%, maka akan meningkatkan sebesar 0,00000543% tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur dengan asumsi variabel PDRB dan variabel investasi konstan.

Pembahasan

Pengaruh PDRB Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur

Pada penelitian ini menyatakan bahwa PDRB mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 hingga 2021. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari Mulianta Ginting (2014) dengan judul ”Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia” dengan hasil penelitian, variabel PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan. Hal tersebut berarti setiap terjadi peningkatan PDRB sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan ketimpangan wilayah di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hasil analisis ini sesuai dengan teori pendapatan nasional dan teori Kuznets, di mana pendapatan nasional adalah PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan yang tujuannya untuk dapat melihat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya. Sedangkan dalam teori Kuznets dalam analisisnya, Kuznets menemukan relasi antara tingkat kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik, yaitu menyatakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan. Distribusi pendapatan atau kesenjangan cenderung memburuk, Namun, pada tahap-tahap berikutnya distribusi pendapatan akan membaik seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Jadi, seiring berjalannya waktu setelah melewati masa awal pertumbuhan ekonomi, PDRB akan mengalami peningkatan yang berarti setiap peningkatan 1% pendapatan nasional itu maka akan menurunkan 1% tingkat ketimpangan di wilayah tersebut. Hasil pneitian ini juga sesuai dengan Hipotesa Neo-Klasik yang menyatakan bahwa pada permulaan proses pembangunan suatu

wilayah, ketimpangan pembangunan antar wilayah lebih cenderung meningkat, kemudian bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan wilayah tersebut akan menurun. Kenaikan pada PDRB yang berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur di gambarkan pada Gambar 1.

Berdasarkan pada analisa grafik pada gambar di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hasil perhitungan indeks williamson menggambarkan ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,5 dan rata-rata PDRB sebesar 45.274. kemudian, perkembangan terus terjadi pada indeks williamson yang mengalami *trend* penurunan sedangkan rata-rata PDRB pada tahun-tahun selanjutnya menunjukkan adanya *trend* kenaikan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 turun dikarenakan adanya covid-19 yang membuat perekonomian menurun pada saat awal pandemi itu terjadi. Namun, meskipun hasil dalam penelitian ini menunjukkan indikasi adanya kenaikan pada PDRB tetapi hal ini berpengaruh dalam menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi fakta di lapangan PDRB masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan distribusi yang tidak merata yang menyebabkan ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, misalnya PDRB di Kabupaten Kutai Kartanegara tergolong dalam PDRB yang sangat tinggi sedangkan PDRB di Kabupaten Mahakam Ulu tergolong ke dalam PDRB yang sangat rendah dibandingkan dengan PDRB di Kabupaten Kutai Kartanegara dan kabupaten/kota lainnya.

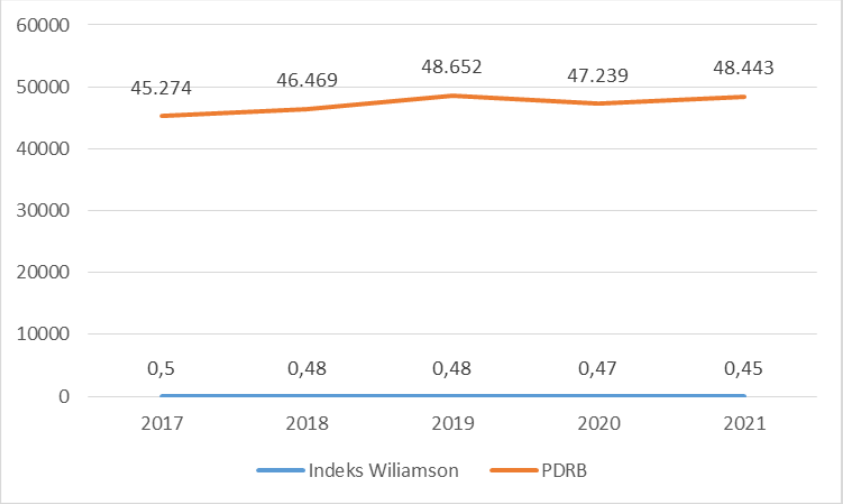

Gambar 1 Rata-rata PDRB dan Indeks Williamson di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021 (sumber: diolah)

Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

Pada penelitian ini menyatakan bahwa investasi mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 hingga 2021. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ArieMay Nurcahyo (2021) dengan judul ”Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah di Jawa Timur” dengan hasil penelitian bahwa variabel investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, hasil ini juga sama dengan penelitian terdahulu lain yang dilakukan oleh Sandi Cahya Gumelar (2023) dengan judul ”Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita, Jumlah Penduduk, Investasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2021” dengan hasil penelitian menunjukkan variabel investasi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Jawa, penelitian lain yang dilakukan oleh Khoir Akfini Didia

(2016) dengan judul ”Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur” memiliki hasil bahwa variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Kawasan Kedungsepur, dan hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mukhammad Syarifudin Hidayatullah Handoko, Wahyu Hidayat Riyanto, dan Yunan Syaifullah (2020) dengan judul ”Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Timur” dengan hasil penelitian yaitu variabel investasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Kalimantan Timur. Hal tersebut berarti setiap terjadi peningkatan investasi sebesar 1% maka akan menaikkan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi, karena menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara investasi dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur maka dalam setiap peningkatan investasi ini belum memberikan hasil yang maksimal terhadap pembangunan ekonomi antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan pada teori Harrod-Domar menjelaskan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif dan terpusatnya investasi di suatu wilayah, maka ketimpangan distribusi investasi ini dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan. Tetapi kenyataannya hasil yang diperoleh dari penelitian ini tidak sesuai dengan teori tersebut, di mana investasi tidak secara signifikan berpengaruh pada ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017-2021. Hal ini dapat terjadi karena Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki kondisi perekonomian yang beragam dan banyaknya wilayah di provinsi tersebut yang laju pertumbuhan ekonominya tidak merata.

Fakta di lapangan bahwa lambatnya perkembangan investasi PMA dan PMDN di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur disebabkan karena keunggulan-keunggulan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur belum didukung dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung seperti susahnya jalur transportasi dikarenakan aksesnya yang masih terbatas serta belum didukung dengan adanya peningkatan kearifan budaya lokal di setiap wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri. Adapun ciri dari kearifan lokal dapat berupa pertahanan terhadap budaya luar yang masuk, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar menjadi tren yang dapat melunturkan karakteristik budaya yang ada di wilayah tersebut. Hubungannya kearifan lokal dengan investasi adalah lebih menekankan pada karakteristik (ciri khas) yang ada pada masing-masing wilayah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur misalnya dalam hal hasil-hasil produksi lokal yang mencirikan budaya dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tertentu bisa menarik investor dalam berinvestasi di wilayah tersebut.

Pengaruh Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

Pada penelitian ini menyatakan bahwa aglomerasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 hingga 2021. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arie May Nurcahyo (2021) dengan judul ”Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah di Jawa Timur” dengan hasil penelitian bahwa variabel aglomerasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Hal tersebut berarti setiap terjadi peningkatan aglomerasi sebesar 1% maka akan menaikkan 1% ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini sejalan dengan teori Neo Klasik yang mengatakan bahwa aglomerasi bisa terjadi di suatu wilayah dikarenakan adanya pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki motif untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan ekonomi yaitu keuntungan lokalisasi dan keuntungan urbanisasi, keuntungan lokalisasi yaitu didapat dalam bentuk keseluruhan biaya produksi yang timbul akibat berlokasi secara terkonsentrasi dengan wilayah terkait lainnya dalam sebuah pusat pertumbuhan sedangkan keuntungan urbanisasi yaitu didapat dari keuntungan penggunaan fasilitas dalam sebuah pusat pertumbuhan secara bersamaan yang bisa menunjang kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Lalu hal ini juga sejalan dengan teori kutub pertumbuhan (Perroux) dan Pusat Pertumbuhan (Boudeville) yang di mana dikatakan bahwa kegiatan ekonomi suatu daerah cenderung beraglomerasi di sekitar pusat-pusat pertumbuhan, pusat pertumbuhan ini memiliki karakteristik utama yaitu sekelompok kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu, konsentrasi kegiatan ekonomi ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan dalam kelompok kegiatan tersebut terdapat sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi. Adanya pusat pertumbuhan di suatu wilayah dapat mengakibatkan ketimpangan antar wilayah apabila pusat pertumbuhan tersebut tidak memberikan dampak terhadap wilayah lain di sekitarnya, sehingga proses pertumbuhan dan pembangunan yang tinggi hanya terjadi di wilayah pusat pertumbuhan saja sementara di wilayah lain yang bukan merupakan pusat pertumbuhan akan memiliki perekonomian yang rendah.

Munculnya aglomerasi di daerah atau wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut karena membuat terciptanya efisiensi produksi. Sehingga penghematan aglomerasi ini sebagai bentuk penghematan karena adanya lokasi yang saling berdekatan dan dengan pengelompokan perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen secara spasial untuk meminimalisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi. Keuntungan lainnya dari aglomerasi yaitu adanya penggunaan fasilitas secara bersama dalam kegiatan ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain listrik, pergudangan, telepon, air minum, dan utilitas lainnya yang menunjang kegiatan operasi perusahaan. Hal tersebut yang telah menyebabkan munculnya aglomerasi di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai dengan penggunaan fasilitas secara bersamaan yang akan dapat menurunkan tingkat biaya yang dapat ditanggung secara bersamaan pula, selain itu aglomerasi di Provinsi Kalimantan Timur ini bisa terjadi disebabkan karena terkonsentrasinya kegiatan produksi yang cukup tinggi yang mendorong pertumbuhan di setiap masing-masing Kabupaten/Kota yang cenderung lebih cepat sedangkan bagi Kabupaten/Kota lain yang memiliki konsentrasi kegiatan produksi yang rendah akan menyebabkan pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur, maka dari itu aglomerasi ini mendorong semakin tingginya ketimpangan pembangunan antar wilayah.

5. Kesimpulan

PDRB mempunyai pengaruh negatif dan signifikan yang berarti PDRB mampu menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Investasi mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan yang berarti investasi belum mampu menaikkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Aglomerasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan yang berarti aglomerasi mampu menaikkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

Daftar Pustaka

Adisasmita, R. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Arsita, A. 2019. Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, ipm, aglomerasi, dan belanja pemerintah daerah terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2013-2017. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Arsyad, L. 2010. Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.

Azizy, A. H. 2018. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan di kawasan strategis kedungsepur Provinsi Jawa Tengah tahun2010-2016. 53(9):1689–1699.

BPS. 2008. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten/Kota Di Indonesia 2008-2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Jhingan, M. . dan D. Guritno. 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kuncoro, M. dan C. Kristiaji. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang. Jakarta: Erlangga.

Kiton, M. A. 2019. Analisis ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Smart*. 3(2):68–80.

May Nurcahyo, A. 2021. Anlisis ketimpangan pembangunan antar daerah di jawa timur. *Jurnal Ilmiah*. 10(2):1–13.

Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori Dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media,Cetakan Pertama.

Peran *Home Industry* Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Home Industry Kerupuk Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan)

Lailatul Munawwaroh [a,1,*], Mohammad Saleh [b,2], Sebastiana Viphindrartin [c,3], Umi Cholifah[d,4], Agus Mahardiyanto[e,5], Sjafruddin[f,6]

[A,b,c,d,e,f] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jalan Kalimantan No. 37, Jember 68121, Indonesia

[1]lailatulmunawwaroh12@gmail.com ; [2]fe.m.saleh@unej.ac.id ; [3]sebastiana@unej.ac.id; [4]umicholifah.feb@unej.ac.id; [5]agusmahardiyanto.feb@unej.ac.id; [6]sjafruddin@unej.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history
Received October 2023
Revised March 2024
Accepted May 2024

ABSTRACT

This home industry is a business unit or company on a small scale which generally only uses one or two houses as a production center. The existence of a home industry provides quite a lot of positive impacts on the people's economy, both in terms of employment and increasing people's income, especially for the lower class. This study aims to determine the role of the cracker home industry on the economy of the people in Sladi Village. This study aims to determine the role of home industry in improving the economy of the people in Sladi village. This research is qualitative in nature, so in collecting data the writer uses interview, observation, and documentation techniques. As primary data, namely data obtained from respondents, owners and workers in the home industry. Meanwhile, secondary data was obtained from references related to the problems studied. The results of field research show that the existence of the cracker home industry in Sladi Village has a positive role in the community's economy in terms of employment and increasing people's income in Sladi Village, especially the workforce working in it.

Keywords
Home Industry, Community Economic Growth, Labor Absorption, Increasing Community Income

1. Pendahuluan

Dalam hal menunjang kemajuan suatu bangsa, ekonomi menjadi aspek yang cukup penting dalam mencapai hal tersebut. Bangsa yang besar merupakan bangsa yang dapat menumbuhkan serta memajukan sektor ekonominya, baik dalam sektor formal maupun non formal guna memperhatikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya. Sebagai akibat dari peningkatan daya saing global ini, semakin banyak sektor-sektor kecil yang bermunculan, termasuk industri rumah tangga, yang juga ingin tumbuh agar bisa maju dalam dunia komersial dan lapangan kerja. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 mendefinisikan industri kecil sebagai industri yang penjualan tahunannya tidak lebih dari Rp 1 miliar dan kekayaan bersihnya tidak lebih dari Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat perusahaan itu berada).

Salah satunya di Kabupaten Pasuruan, perkembangan *home industry* atau industri kecil di Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan tergolong baik. Hal ini mampu memberikan kontribusi perekonomian khususnya pada penyediaan lapangan kerja. Di Kabupaten Pasuruan, keberadaan industri kecil atau home industry menjadi salah satu sektor yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi diantara banyaknya industri besar yang berada di Kabupaten Pasuruan. Hal ini disebabkan karena sektor indutri memiliki peranan untuk mengatasi masalah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis agroindustri yang bersifat padat karya terutama di daerah pedesaan.

Menurut Mubyarto, usaha kecil, yang umumnya terdapat di daerah pedesaan, dapat berperan penting dalam upaya mendorong kesetaraan dan pembangunan ekonomi pedesaan karena mereka dapat membantu masyarakat desa, yang biasanya tidak bekerja penuh waktu, mendapatkan peluang kerja baru serta membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sumber pendapatan baru. Hal ini didukung dengan teori menurut Schumpeter (1934) pentingnya kewirausahaan atau *entrepreneurship* dalam pertumbuhan ekonomi menghasilkan transformasi ekonomi yang disebabkan oleh upaya gagah berani dari orang-orang yang menjadi pionir pembangunan ekonomi baru.

Seperti halnya di Desa Sladi yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kecamatan Kejayan. Pentingnya peranan *home industry* yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat tidak lepas dari Desa Sladi. Desa Sladi merupakan salah satu desa di Kabupaten Pasuruan yang keberadaannya berada di wilayah berdirinya industri-industri besar. Sebagian besar penduduk di Desa ini bekerja sebagai petani dan buruh tani. Desa yang dihuni oleh 3.191 jiwa penduduk ini masih tergolong rendah tingkat pendidikannya. Yakni sebanyak 849 penduduk hanya tamatan SD atau Sederajat. Selain itu juga terdapat 2.178 penduduk dalam usia kerja, atau berusia antara 15 dan 60 tahun.

Dengan kondisi masyarakat yang demikian, akan cukup sulit bagi masyarakat untuk dapat memasuki dunia kerja pada saat ini yang banyak membutuhkan persyaratan khusus agar dapat bergabung atau bekerja di dalamnya. Maka keberadaan *home industry* cukup berperan baik bagi masyarakat di desa ini, terlebih lagi dalam hal penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan pendapatan atau perekonomian masyarakat desa. Mengingat tidak dibutuhkannya syarat khusus untuk dapat bergabung dalam sebuah *home industry*.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa, jenis *home industry* yang berdiri dan cukup baik berkembang di desa ini adalah *home industry* kerupuk. Jenis *home industry* kerupuk jarang atau bahkan tidak ditemukan di Desa sekitar, sehingga keberadaan *home industry* di desa Sladi ini memiliki peluang yang cukup baik untuk dapat berkembang. Berdasarkan keterangan oleh kepala desa, terdapat 4 *home industry* kerupuk yang berada di Desa ini. Meskipun terlihat sederhana atau hanya akan terdapat sedikit jumlah pekerja yang berkontribusi dalam proses produksi dari ke empat industri kerupuk ini, namun masih banyak dampak yang diberikan dengan adanya *home industry* kerupuk ini. terdapat banyak masyarakat yang terbantu dengan keberadaan *home industry* ini yang jumlahnya tidak dapat dipastikan besarnya. Sebagai contoh banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai penjual kerupuk keliling maupun yang menjualnya di warung atau toko milik mereka. Tidak hanya itu, terdapat juga masyarakat yang

terbantu dengan mendapatkan pekerjaan sebagai pembungkus kerupuk yang akan dijajakan. Proses pembungkusan kerupuk yang dapat dilakukan di rumah masing-masing, memberikan dampak juga kepada para keluarga maupun tetangga yang lain.

Selain itu dengan adanya proses pembungkusan di rumah masing-masing tenaga kerja, keluarga yang berada di rumah tersebut secara tidak langsung juga ikut bekerja meskipun tidak secara langsung mendapat gaji dari pemilik *home industry*. Melainkan keluarga ini membantu meningkatkan pendapatan keluarganya dengan cara membantu agar jumlah kerupuk yang dapat dibungkus per harinya bisa mencapai target atau bisa membungkus banyak kerupuk per harinya, yang mana pendapatan dari proses pembungkusan ini diperoleh dengan sistem borong atau apabila semakin banyak jumlah kerupuk yang dapat dibungkus, maka juga semakin banyak pendapatan yang bisa diperoleh.

Peneliti tertarik untuk mengkaji usaha rumah kerupuk di Desa Sladi berdasarkan permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah keberadaan sektor rumah kerupuk akan secara signifikan membantu meningkatkan perekonomian lokal di kota-kota pedesaan. Penelitian yang diberi nama "Peran *Home Industry* Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus *Home Industry* Kerupuk Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan)" dilakukan dengan latar belakang tersebut.

2. Tinjauan Pustaka

Konsep Home Industry

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 industri kecil diartikan sebagai industri yang penjualan tahunannya tidak lebih dari Rp 1 miliar dan kekayaan bersihnya tidak lebih dari Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat perusahaan itu berada). Menurut Tulus T.H. Tambunan, industri rumah tangga sering kali merupakan unit usaha yang lebih tradisional karena menggunakan struktur organisasi dan manajerial yang layak seperti yang terdapat di sebagian besar perusahaan masa kini, namun tidak memiliki pembagian kerja yang jelas atau metode untuk memelihara catatan keuangan.

Menurut Mubyarto, usaha kecil, yang umumnya terdapat di daerah pedesaan, dapat berperan penting dalam upaya mendorong kesetaraan dan pembangunan ekonomi pedesaan karena mereka dapat membantu masyarakat desa, yang biasanya tidak bekerja penuh waktu, mendapatkan peluang kerja baru serta membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sumber pendapatan baru. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dimuat dalam jurnal *"Effectiveness Of Home Industry Activities In Building The Economy Of The Community In Indonesia*" oleh Harun Blongkod dan Herlina Rasjid pada tahun 2022. yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, menunjukkan hasil bahwa kegiatan home industry sangat mendukung perekonomian masyarakat, di mana kegiatan ini umumnya dilakukan oleh keluarga yang mencari tambahan pendapatan keuangan. Sehingga keberadaan *home industry* ini diharuskan untuk mendapat perhatian dari pemerintah agar nantinya para pelaku *home industry* ini mampu mengembangkan usahanya tidak hanya dalam skala lokal melainkan juga dalam skala nasional bahkan internasional.

Entrepreneurship

Menurut Schumpeter, inovasi dalam bentuk kreativitas wirausaha merupakan kekuatan paling signifikan dalam perekonomian. Menurut gagasan ini, pentingnya kewirausahaan atau entrepreneurship dalam pertumbuhan ekonomi menghasilkan transformasi ekonomi yang disebabkan oleh upaya gagah berani dari orang-orang yang menjadi pionir pembangunan ekonomi baru. Artinya, untuk merespons setiap perkembangan ekonomi yang terjadi, wirausahawan harus waspada terhadap prospek inovasi. Oleh karena itu, akan muncul sistem baru dengan ide-ide yang lebih orisinal dan mampu mendorong pembangunan dan kemajuan ekonomi berkat kombinasi wirausaha kreatif tersebut.

Irawan (1997) menjelaskan prasyarat agar terciptanya inovasi yang diantaranya harus adanya jumlah inovator wirausaha yang memadai di masyarakat, selain itu juga perlunya lingkungan sosial, politik dan teknis yang harus mampu mendorong inovasi dan implementasi dari ide inovatif ini sendiri. Kehadiran lingkungan yang mendorong penemuan sangat penting bagi proses inovasi. Lingkungan yang optimal bagi lahirnya inovator dan invensi yang memiliki semangat kreativitas tinggi adalah dengan mendapat dukungan dari lembaga-lembaga sosial dan pemerintahan terkait.

Peran Pemerintah dan Kebijakan terkait Entrepreneurship

Menurut Parsons (2006), adanya suatu rencana atau ranah tata ruang dalam kehidupan yang bukan bersifat privat melainkan milik publik atau publik inilah yang dimaksud dengan kebijakan publik. Publik ini sudah mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat yang dianggap memerlukan peraturan pemerintah. Peran pemerintah dalam menetapkan undang-undang yang dapat menghambat atau mendorong pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kewirausahaan. Dengan memberikan subsidi kepada UKM, pemerintah berperan dalam mendorong perluasan dan pengembangan usaha. Selain itu, pemerintah sedang mengembangkan rencana untuk meningkatkan daya saing lokal melalui kewirausahaan berbasis masyarakat.

Salah satu kebijakan terkait terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang UMKM, Kebijakan Modernisasi Usaha, Kebijakan Stabilisasi Usaha, dan Kebijakan Penghapusan Kelemahan UMKM, diterapkan di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan sektor industri. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam proses pembinaan kegiatan industri yang melahirkan wirausaha-wirausaha baru guna memajukan industri daerah yang berbasis sumber daya lokal.

Tenaga Kerja

Tenaga kerja didefinisikan sebagai seluruh populasi suatu negara yang mampu menghasilkan produk dan jasa asalkan ada pasar untuk tenaga kerja mereka dan jika mereka bersedia untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut, atau populasi suatu negara yang bekerja, usia yang dimaksud adalah antara 15 dan 64 tahun. Adam Smith (1729–1790), mengusulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia yang efisien merupakan prasyarat bagi kemakmuran ekonomi. Kemudian, ketika perekonomian berkembang, akumulasi modal (fisik) tambahan diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa alokasi sumber daya manusia yang baik merupakan syarat kemajuan perekonomian.

Banyaknya jabatan yang terisi atau serapan tenaga kerja ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja secara signifikan. Berbagai sektor ekonomi menyerap dan mendistribusikan penduduk yang bekerja. Kebutuhan akan tenaga kerja inilah yang mendorong masuknya penduduk ke dalam angkatan kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai kebutuhan akan tenaga kerja.

Perekonomian Masyarakat

Menurut Arifin Noor (1997), perekonomian suatu masyarakat dapat dilihat sebagai kumpulan individu yang mengikuti aturan, konvensi, dan tradisi yang lazim dalam komunitas tersebut. Dalam konteks ini, peningkatan tingkat perekonomian berarti mendorong usaha mandiri yang menghasilkan keuntungan dan menempatkan prioritas tinggi pada pengelolaan. Dengan memaksimalkan potensi masyarakat atau memberdayakannya, maka penciptaan ekonomi kerakyatan harus meningkatkan keterampilan masyarakat. Produktivitas individu akan meningkat sebagai akibat dari upaya pengorganisasian sumber daya untuk mewujudkan potensi tersebut, yang nantinya akan meningkat pula produktivitas sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di sekitarnya.

Fachri Yasin menegaskan, ada dua pendekatan dalam memahami perekonomian kerakyatan. Cara pertama adalah dengan melihat aktivitas perekonomian para pelaku ekonomi skala kecil atau yang biasa

disebut perekonomian kerakyatan. Strategi ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku ekonomi usaha kecil, yang pada akhirnya akan memperkuat perekonomian masyarakat. Kedua, dengan menggunakan model pembangunan demokratis yang dikenal dengan pembangunan partisipatif atau demokrasi ekonomi. Strategi kedua ini bertujuan untuk menerapkan gagasan demokrasi dalam pembangunan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena dilakukan dalam *natural setting* (keadaan alam), Sugiyono berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif kadang disebut juga metode penelitian naturalistik. Maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai data primer yaitu data yang diperoleh dari responden seperti: Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BumDes sebagai informan pangkal dan pemilik *home industry* dan tenaga kerjanya sebagai informan kunci. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan yangditeliti seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan lainnya.

Sedangkan untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan oleh peneliti guna mempersempit fokus penelitian ini dan lebih mencapai tujuannya, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Sehingga peneliti akan melakukan triangulasi sumber-sumbernya dengan mengkarakterisasi, mengklasifikasikan, dan mengidentifikasi perspektif mana yang dimiliki bersama dan berbeda serta mana yang spesifik dalam tanggapan wawancara dari informan. Kemudian Analisis Data yang digunakan yaitu meliputi langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Home Industry

a. Menyerap Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil temuan wawancara bersama para informan terkait penyerapan tenaga kerja, selain dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja pada berikut, dampak dari adanya *home industry* kerupuk ini juga banyak berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Misalnya juga memberikan kesempatan kerja terhadap masyarakat untuk dapat bekerja sebagai penjual kerupuk keliling. Selain itu juga terdapat tenaga kerja yang tidak diketahui bahkan oleh pemilik *home industry*, yang mana pada proses pembungkusan kerupuk para tenaga kerja membawa pekerjaannya pulang ke rumah. Sehingga dengan membawa pekerjaan untuk membungkus inilah yang kemudian akan membuka peluang lebih luas untuk keluarga atau tetangganya untuk dapat bergabung bekerja.

Tabel 4. Data Tenaga Kerja di *Home industry* Kerupuk Desa Sladi

No.	Nama Pemilik	Tahun Berdiri	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	Bang Jajak	2000	17
2	Bang Andri	2012	30
3	Pak Uuk	2010	5
4	Pak Lukman	2012	4

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Informan

Berkembangnya industri rumah tangga kerupuk di Desa Sladi dapat menciptakan lapangan kerja bagi desa atau tetangganya, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan di Desa Sladi. Tidak hanya masyarakat yang ikut berkecimpung langsung dalam proses produksinya, namun masih banyak masyarakat yang juga ikut mendapat dampak dari adanya *home industry* ini yang mana

mereka tidak secara langsung bekerja pada pemilik industri ini. Namun mereka juga merasakan dampak dari adanya *home industry* ini, demikian tuturan yang diperoleh dari wawancara dengan para informan.

b. Meningkatkan Pendapatan

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah uang yang diterima masyarakat khususnya karyawan industri rumahan kerupuk di Desa Sladi dari usaha rumahan kerupuk tersebut. Berdasarkan temuan penelitian data lapangan, karyawan industri rumahan kerupuk rata-rata dapat memperoleh penghasilan antara 30.000 dan 100.000 per hari, atau 900.000 hingga 3.000.000 per bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa usaha rumahan kerupuk di Desa Sladi sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau pendapatan keluarga sebagai imbalan atas kerja keras yang dilakukan dalam pembuatan barang maupun dalam hal pemasaran. Sebagian besar pekerja di sektor rumahan kerupuk adalah ibu rumah tangga atau belum pernah bekerja sehingga sering kali mempunyai pendapatan yang kecil. Selain itu, beberapa karyawan yang bekerja di sektor kerupuk justru mendapat penghasilan lebih. Penghasilan ini pun sebagian bukan hanya sebagai penghasilan pokok, namun juga beberapa dari mereka menjadikan penghasilan dari industri ini sebagai penghasilan tambahan.

Bentuk Perhatian Pemerintah

Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pasuruan terfokus kepada 3 (tiga) hasil yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri, Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan, dan Meningkatnya Perlindungan Konsumen. Tidak hanya Pemerintah daerah, Pemerintah desa juga memiliki tugas dan kewenangan dalam kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya. Berdasarkan temuan wawancara ketiga informan dengan peneliti, kontribusi pemerintah desa terhadap keberlangsungan industri rumah tangga kerupuk saat ini tidak terlalu berkaitan dengan permodalan dibandingkan dengan perizinan usaha, pemasaran, atau pengenalan produk kepada masyarakat umum melalui perencanaan yang matang.

5. Kesimpulan

Peran atau kontribusi *home industry* kerupuk terhadap perkembangan perekonomian lokal di Desa Sladi. Berkembangnya industri rumah kerupuk di Desa Sladi memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang bekerja pada sektor tersebut secara langsung maupun tidak. Di mana dengan adanya *home industry* ini maka terciptanya lapangan kerja baru serta secara otomatis juga hal ini merupakan upaya pengentasan pengangguran guna sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Khususnya bagi perempuan yang ingin menunjang pertumbuhan ekonomi keluarganya. Mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh dari rumah karena mereka bekerja di sektor rumahan; sebenarnya, beberapa tugas mungkin diselesaikan di sana. Agar pendapatan keluarga dari pekerjaan baru tersebut meningkat, yang tentunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran sehari-hari. Sedangkan bentuk dari perhatian Pemerintah desa yaitu dengan memberikan perhatian terhadap industri rumah tangga kerupuk di Desa Sladi dalam bentuk bantuan pengurusan izin usaha serta promosi atau pengenalan produk kepada masyarakat luar melalui acara-acara yang diikuti oleh BumDes dan masih kurangnya dukungan pendanaan atau investasi pada sektor perindustrian dan perdagangan pada skala *home industry.*

Daftar Pustaka

Arifin Noor. (1997). Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU. Bandung : CV Pustaka Setia.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. (2022). Direktori Perusahaan Industri Kabupaten Pasuruan 2022. Pasuruan : Badan Pusat Statistik.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan. (2021). Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021. Pasuruan : Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Emzir. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fachri Yasin dkk. (2002). Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan. Pekanbaru : Unri Perss.

Harmonis, R. (2021). Efektivitas Home Industry dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Ditinjau dari Produksi Islam (Doctoral dissertation, PAI).

Michael Todaro. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta : Erlangga.

Mubyarto. (1983). Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. Jakarta: Sinar Harapan.

Mubyarto. (1985). Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan. Yogyakarta: BPFE.

Mubyarto. (1997). Ekonomi Rakyat, program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia. Yogyakarta : Aditya Media.

Parsons, Wayne. (2006). Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta.

Kencana Prenada Media Group.

Schumpeter J. (1934). The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Harvard U.

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: ALFABETA.

Sumarsono, Sonny. (2009). Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga

Tulus T.H Tambunan. (2002). Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Beberapa Isu Penting), Jakarta: Salemba empat.

Tulus T.H Tambunan. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu-Isu Penting), Jakarta: LP3ES.

UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah)

ANALISIS PERMINTAAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DI PULAU JAWA PERIODE TAHUN 2012-2022

Bintang Putri Artha [a,1,*], Fivien Muslihatinningsih[b,2], Teguh Hadi Priyono [c,3], Riniati[d,4], Lusiana Ulfa Hardinawati[e,5], Yulia Indrawati[f,6], Agus Luthfi[g,7]

[A,b,c,d,e,f,g] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jalan Kalimantan No.37,Jember 68121, Indonesia
[1] Putriartha@gmail.com; [2] fmn.feunej@gmail.com; [3] teguh_hadipriyo@yahoo.com; [4] riniati.prawiro@gmail.com; [5]lusiana.uh@unej.ac.id; [6] yuliaindrawati2012@gmail.com; [7] agusluthfi05@gmail.com
* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history
Received May 2024
Revised May 2024
Accepted May 2024

ABSTRACT (10PT)

Indonesia is a developing country with the number of workers in the 2022 reaching 144.01 people, which has increased from the previous year. In line with the increasing number of workers, there is a need for data related to the number of labor demands in Indonesia. This research aims to analyze the influence of Technology, Provincial Minimum Wages and Economic Growth on labor demand in the industrial sector on the island of Java for the period 2012-2022. The data used in this research uses secondary data. The method used in this research uses a panel data analysis method with the selected model, namely the Fixed Effect Model (FEM). The results of this research show that manufacturing machine technology has a positive and significant effect on labor demand, the provincial minimum wage has a positive and significant effect on labor demand, and economic growth has a positive and significant effect on labor demand

Keywords
Labor Demand, Manufacturing Machine Technology, Provincial Minimum Wage, Economic Growth

1. Pendahuluan

Hukum permintaan jika semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak pula permintaan akan barang tersebut begitu pula sebaliknya, Sedangkan kurva permintaan memberi ketentuan pembeli menjadi kompetitor yang sempurna dengan kata lain bahwa pembeli tidak mempunyai pengaruh terhadap harga pasar. (Nainggolan, Lora Ekana : 2020)

Teori permintaan tenaga kerja tergantung pada upah, yaitu semakin rendah upah, maka semakin banyak permintaan tenaga kerja dalam suatu perekonomian. Permintaan tenaga kerja atau kebutuhan tenaga kerja dalam suatu perkembangan ekonomi dapat dilihat dari kesempatan kerja dari setiap sektor atau kebutuhan tenaga kerja di mana jumlah kesempatan kerja yang tersedia di dalam sistem ekonomi dinyatakan dalam jumlah satuan orang yang bekerja pada masing-masing sektor untuk melakukan kegiatan produksi. (Dyanasari: 2022)

Teknologi merupakan faktor penting dalam suatu produktivitas karena dengan adanya teknologi, proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Teknologi juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, dikarenakan semakin tinggi teknologi yang digunakan maka semakin rendah pula waktu produksinya, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi lebih rendah. (Ernawaty: 2020)

Berdasarkan data empiris yang didapatkan dari permintaan tenaga kerja di Pulau Jawa bahwa pengaruh teknologi, upah minimum provinsi serta pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Peningkatan permintaan tenaga kerja di Pulau Jawa berbeda-beda di setiap provinsi per tahunnya. Permintaan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja tertinggi di 3 Provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada tahun 2014-2017 di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja dari 1.543.036 menjadi 2.716.163 pekerja. Pada tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah mengalami permintaan tenaga kerja tertinggi sebesar 2.571.409, dan terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Permintaan Tenaga kerja untuk daerah DIY mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019 dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 298.295 pekerja. Sedangkan pada Provinsi Banten mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya. (BPS.go.id).

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh teknologi terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri di Pulau Jawa pada periode Tahun 2012-2022.

2. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum Provinsi terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri di Pulau Jawa pada periode Tahun 2012-2022.
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri di Pulau Jawa pada periode Tahun 2012-2022.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh dengan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi. Teori Tenaga Kerja klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah awal bagi pertumbuhan ekonomi. (Lora Nainggolan:2021)

Jaques Ellul mengemukakan tentang teknologi sebagai kumpulan alat, aturan dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam cara yang memungkinkan pengulangan. Teknologi mengandung dua dimensi, yaitu *science* dan *engineering* yang saling berkaitan satu sama lainnya. hasil penerapan sistematik dari sains, yang merupakan himpunan rasionalitas insani kolektif, untuk memanfaatkan hidup dan mengendalikan gejala-gejala di dalam proses produktif yang ekonomis. Teknologi yang berhasil memperingan kerja manusia, di lain pihak dapat menyebabkan pengangguran. Teknologi juga dapat mempengaruhi kebutuhan permintaan tenaga kerja, dikarenakan semakin tinggi teknologi yang digunakan maka semakin rendah pula waktu produksinya, sehingga permintaan tenaga kerjanya menjadi lebih rendah. (Shely Cathrin:2019).

Pandangan Keynes berbeda dengan pandangan klasik mengenai harga dan upah yang di anggap luwes dan fleksibel. Menurut Keynes beranggapan bahwa penurunan upah cenderung tidak luwes (*rigid*). Ketidakluwesan itu disebabkan oleh faktor-faktor institusional, seperti perjanjian serikat buruh, undang-undang upah minimum, dan perjanjian implisit (antara majikan dan buruh). Dalam periode menurunnya permintaan total terhadap barang dan jasa, perusahaan-perusahaan bereaksi terhadap penurunan penjualan dengan mengurangi penjualan produksi dan memberhentikan buruh, bukan dengan memotong upah. Menurut Keynes, penurunan harga sama, hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penurunan permintaan efektif pada awalnya menyebabkan penurunan produksi dan kesempatan kerja bukan penurunan harga. John Maynard Keynes menjelaskan para pekerja memiliki semacam serikat tenaga kerja *(Labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat

upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan (tetapi kemungkinan ini dinilai kecil sekali), tingkat pendapatan masyarakat tersebut dapat menyebabkan jumlah permintaan akan turun. Turunnya pendapatan sebagai anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga. (Indra: 2020)

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berdasarkan informasi statistika. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. (Sugiyono: 2016)

Data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang akan diolah. [1](Kuncoro: 2009). Sedangkan sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari mana data yang akan dianalisis diperoleh dan memiliki informasi kejelasan mengenai pengambilan dan pengolahan data. (Arikunto: 2013)

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel digunakan untuk memprediksi pengaruh terhadap variabel terikat berjumlah lebih dari satu, dengan tujuan untuk menghitung intensitas hubungan yang terjadi antara dua variabel dan membuat prediksi yang tepat. Persamaan analisis regresi data panel ditulis sebagai berikut: (Nachrowi & Usman: 2006).

$$Y_{it} = a + b_1X_{1it} + b_2X_{2it} + b_3X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} : Tenaga Kerja Industri
a : konstanta
b : koefisien regresi
X_1 : Teknologi di Sektor Industri
X_2 : Upah Minimum Provinsi (UMP)
X_3 : Pertumbuhan Ekonomi (PE)
e : standar error.
i : provinsi
t : waktu (2012-2022) (Sugiyono: 2014)

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- Hasil Analisis Regresi Data Panel

1) Uji Chow

Selanjutnya dilakukan perhitungan uji Chow pada ketiga variabel, berupa variabel Teknologi, Upah Minimum Provinsi dan Pertumbuhan Ekonomi, maka didapatkan hasil uji Chow dengan aplikasi Eviews sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	3.610398	2,23	0.0433
Cross-section Chi-Square	8.737154	2	0.0127

Sumber: Data diolah dari Output Eviewers 12, 2023

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil dari uji Chow menunjukkan bahwa ketiga variabel menunjukkan hasil model estimasi yang tepat digunakan pada regresi data panel adalah Fixed Effect Model. Dibuktikan dengan hasil probability Cross section F yaitu 0,0433 maka nilai probabilty < 0,05 menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan Fixed Effect Model.

2) Uji Hausman

Tahapan selanjutnya yaitu uji Hausman bertujuan untuk membandingkan antara fixed effect model dengan random effect model, untuk mengetahui metode mana yang baik di gunakan antara random effect dan fixed effect.

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman

Correlated random Effects – Hausman Test
Equation : unitled
Tes Cross-Section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	3.197535	1	0.00738

Sumber: Data diolah dari Output Eviewers 12, 2023

Berdasarkan uji hausman diperoleh nilai Signifikasi dari Cross-section random sebesar 0,00 (lebih kecil dari 0,05) sehingga secara statistik Ho ditolak dan menerima Ha, maka model estimasi yang tepat digunakan pada regresi data panel adalah Fixed Effect Model.

Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Panel Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	2003.945	1.035779	1934.723	0.0000
Teknologi	6.3905	5.3505	1.194765	0.0571
UMP	4.7507	2.4207	1.962443	0.0605
PE	1.7907	8.7308	2.055974	0.0488

Sumber: Data diolah dari Output Eviewers 12, 2023

Dalam model ini menunjukkan pengaruh dari permintaan tenaga kerja terhadap teknologi, upah minimum provinsi serta pertumbuhan ekonomi pada Sektor Industri yang ada di Pulau Jawa sejak tahun 2012 hingga 2022.dari model ini diperoleh persamaan linier sebagai berikut:

$$TKI_{it} = 2003.945 + 6.3905\ Teknologi + 4.7507UMP + 1.7907PE + \varepsilon_{it}$$

Berdasarkan hasil persamaan diatas dihubungkan antara variabel dependen dengan variabel independent maka didapatkan hasil analisis sebagai berikut:

a. Konstanta α menunjukkan nilai 2003.945 yang artinya jika variabel independent yaitu teknologi, upah minimum Provinsi serta pertumbuhan ekonomi diasumsikan nol maka akan berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri sebesar 2003.945 jiwa.
b. Pengaruh teknologi, menunjukkan koefisien sebesar 6.3905, yang artinya jika variabel teknologi mesin manufaktur naik sebesar 1 unit maka permintaan tenaga kerja meningkat sebesar 6.3905 unit, dengan asumsi variabel dependen yaitu teknologi, upah minimum provinsi serta pertumbuhan ekonomi terhadap permintaan tenaga kerja konstan.
c. Pengaruh upah minimum Provinsi terhadap permintaan tenaga kerja menunjukkan koefisien sebesar 4.7507, yang artinya jika tingkat upah minimum Provinsi naik sebesar 1 jiwa maka permintaan tenaga kerja meningkat sebesar 4.7507 jiwa, dengan asumsi variabel dependen yaitu teknologi, upah minimum provinsi serta pertumbuhan ekonomi terhadap permintaan tenaga kerja konstan.
d. Pengaruh pertumbuhan ekonomi menunjukkan koefisien sebesar 1.7907, yang artinya jika di log kan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 rupiah maka permintaan tenaga kerja meningkat sebesar 1.7907 rupiah, dengan asumsi variabel dependen yaitu teknologi, upah minimum provinsi serta pertumbuhan ekonomi terhadap permintaan tenaga kerja konstan.

- **Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik**

a.) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebarannya normal. Berdasarkan ketiga variabel data yang diuji normalitas, didapatkan hasil sebagai berikut:

Grafik 4.1 Hasil Uji Normalitas

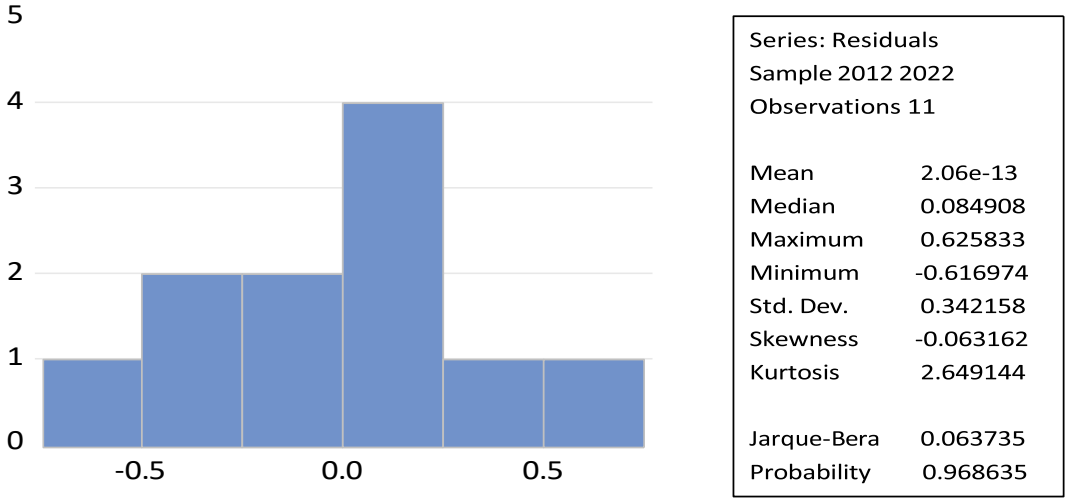

Berdasrkan hasil dari uji normalitas pada pendekatan ini nilai residual terdistribusi secara normal apabila garis (titik-titik) yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. Dari hasil uji di atas dapat dilihat bahwa nilai probability Jarque berra sebasar 0,968635> 0,05, artinya residual data penelitian terdistribusi secara normal.

b.)Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikoleritas bertujuan untuk melihat adanya hubungan atau korelasi antara masing-masing variabel, maka hasil dari uji multikolerasi pada ketiga variabel yaitu variabel teknologi, variabel upah minimum Provinsi dan variabel pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas

	coefficient	Std. Error	t-statistic	prob
Y	1.000000	0.507407	1.840300	0.691659
Teknologi	0,077074	1.000000	0.622766	1.205715
UMP	0.684030	0.622766	0.507000	1.379910
PE	0.691659	0.605150	0.679910	0.683000

Sumber: Data diolah dari Output Eviewers 12, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas, maka mendapatkan nilai korelasi yang dapat ditoleransi dalam uji multikolinearitas pada teknologi sebesar 1,205715 menunjukkan nilai lebih besar dari 0,10 atau 10%, sehingga terdapat adanya multikolinearitas, selanjutnya untuk uji multikolinearitas upah minimu Provinsi sebesar 1,379910 menunjukkan nilai lebih besar dari 0,10 atau 10%, sehingga terdapat adanya multikolinearitas, untuk variabel yang terakhir yaitu uji multikolinearitas pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,683000 menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,10 atau 10%, sehingga tidak terdapat adanya multikolinearitas.

c.) Uji Heterokedisitas

Uji Heterokedisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, maka didapatkan hasil uji heteroskedastisitas, sebagai berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity The Breusch-Pagan-Godfrey	
F-statistic	2.782230
Obs*R-Squared	5.982631
Scaled explained SS	1.997706
Prob. F (3,7)	0.1196
Prob. Chi- Square (3)	0.1125
Prob. Chi- Square (3)	0.5729

Sumber: Data diolah dari Output Eviewers 12, 2023

Berdasarkan hasil dari uji Heteroskedastisitas dengan prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Jika nilai prob nya < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian sedangkan jika nilai prob > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian. Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Breusch-Pagan-Godfrey test ini adalah uji untuk mendeteksi adanya heteroskesdatisitas dalam suatu nilai uji, didapatkan nilai prob nya sebesar 0,1125>0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

d.) Uji Autokolerasi

Selanjutnya yaitu uji Autikorelasi, yang bertujuan untuk mengetahui model yang digunakan menguji adanya korelasi serial atau tidak antar variabel, maka didapatkan hasil uji, sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi

Uji Breusch-Godfrey serial correlation	
F-statistc	0.320902
Obs*R-squared	0.125136
Prob. F (2,5)	0.7394
Prob. Chi-Square (2)	0.5349

Sumber: Data diolah dari Output Eviewers 12, 2023

Hasil dari uji autokorelasi dapat diketahui melalui Uji Breusch-Godfrey, dimana jika nilai prob < 0,05 maka terjadi gejala autokorelasi sedangkan jika nilai prob > 0,05 maka tidak terjadi gejala autokorelasi adalah pengujian yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya korelasi serial dalam model regresi atau untuk mengetahui apakah di dalam model yang digunakan terdapat autokorelasi di antara variabel-variabel yang diamati. Dari hasil uji autokorelasi di atas dapat dilihat bahwa prob 0,5349 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian.

Pembahasan

a. Pembahasan pengaruh teknologi terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri di Pulau Jawa pada periode Tahun 2012-2022

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa pengaruh teknologi mesin manufaktur terhadap permintaan tenaga kerja di sektor industri berhubungan negatif namun berpengaruh secara signifikan. Menurut penelitian terdahulu dari Dian Prihadyanti (2015) menjelaskan bahwa teknologi mesin manufaktur memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian Indonesia. Besarnya kontribusi teknologi mesin manufaktur ini menjadikan teknologi sebagai salah satu mesin penggerak utama ekonomi Indonesia. Berdasarkan Science and Engineering Indicator 2012, terlihat bahwa negara-negara maju telah memiliki teknologi mesin manufaktur dengan intensitas teknologi dan nilai tambah yang tinggi. Hal ini juga diterapkan di Indonesia yang memiliki teknologi mesin manufaktur yang tinggi sehingga waktu produksi yang digunakan semakin cepat sehingga permintaan tenaga kerjanya menjadi lebih rendah.

b. Pembahasan pengaruh upah minimum Provinsi terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri di Pulau Jawa pada periode Tahun 2012-2022

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa jika upah minimum provinsi mengalami kenaikan maka akan menurunkan permintaan tenaga kerja sehingga membuat kebutuhan tenaga kerja akan menurun, dibuktikan dengan hasil uji analisis yang berpengaruh negatif dan signifikan. Sesuai dengan teori yang ada mengenai permintaan tenaga kerja, kenaikan upah minimum provinsi justru akan menurunkan permintaan tenaga kerja. Bagi perusahaan, kenaikan upah minimum provinsi akan meningkatkan biaya perusahaan, sehingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja yang pada akhirnya menyebabkan permintaan tenaga kerja juga menurun.

c. Pembahasan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor industri di Pulau Jawa pada periode Tahun 2012-2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi masyarakat bertambah maka permintaan tenaga kerja juga akan bertambah, dibuktikan dengan hasil uji analisis yang berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini juga sesuai dengan teori ekonomi klasik yang mengatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan permintaan tenaga kerja, bahwa pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh tingkat pengangguran yang semakin menurun. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya maka semakin rendah tingkat pengangguran dan semakin tinggi tingkat permintaan tenaga kerja.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Variabel teknologi mesin manufaktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap permintaan tenaga kerja dengan nilai sebesar 0,0571
b. Variabel upah minimum provinsi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap permintaan tenaga kerja dengan nilai sebesar 0,0605
c. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja dengan nilai sebesar 0,0488

Daftar Pustaka

Fivien, Muslihatinningsih,. Karlina, Kusumasari. 2019. 'Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan', Jurnal Ekonomi Ekuilibrium, 3.2 (2019), 46–54

Muslihatinningsih fivien, Mohammad Saleh, Cita Mukti handayani. 2018. 'Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Pengolahan Di Kabupaten Jember Tahun 2001-2015', Jurnal Ekonomi Ekuilibrium (JEK), 2 (2018)

Florina Yunavania, dkk. 2015. 'Aplikasi Pencarian Agen Resmi PT. Garuda Indonesia Di Wilayah Yogyakarta Pada Ponsel Berbasis Android', Jurnal Teknologi, 8.1 (2015)

Fudjaja. 2002. Dinamika Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Dan Industri Di Sulawesi Selatan, ed. by Institut Pertanian Bogor (Bandung, 2002)

Gujarati, D.N dan D.C Porter. 2013. Dasar-Dasar Ekonometrika, ed. by Salemba Empat, Edisi Ke 5 (Jakarta, 2013)

Islamy, Tlitha. 2013 'Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Produksi Industri Kecil Di Sur', Jurnal Ekonomi & Bisnis, 2013, 1–15

Kiani, Adiqa Qausar. 2021. 'Determinants of Female Labor Force Participation', ASEAN Marketing Journal, 1.2 (2021)

Kuncoro Mudrajad. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, ed. by Erlangga, Edisi 3 (Jakarta, 2009)

Licolin, Arsyad. 2010. Ekonomi Pembangunan, ed. by UPP STIM YKPN (Yogyakarta, 2010)

Lupiyoadi, Rambat dan Ikhsan, Ridho Bramulya.2015. Praktikum Metode Riset Bisnis, ed. Jakarta: Salemba Empat

Mimabar Lalu, Yusuf Muhammad. 2016. 'Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Lombok Barat', Jurnal Valid, 13.3 (2016), 333–43

Muh. Takyuddin. 2016. 'Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Percetakan Foto Copy Di Kota Kendari', Jurnal Ekonomi (JE), 1.E-ISSN: 2503-1937 (2016), 80–89

Muslihatinningsih, Fivien, Miftahul Walid, and I Subagiarta Wayan. 2020. 'Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur (Labor Absorption in East Java Province)', E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, VII.1 (2020), 1–6

Nachrowi Djalal, Hardius Usman. 2006. Pendekatan Populer Dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi Dan Keuangan, ed. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006

Nainggola Lora Eka, Dkk, 2021. Ekonomi Mikro, ed. Medan: Yayasan kita Menulis jilid 1

EDITORIAL TEAM

1.	Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.	Penanggung Jawab
2.	Dr. Teguh Hadi Priyono, S.E., M.Si.	Redaktur
3.	Dr. Edy Santoso, S.E., M.Sc	Editor
4.	Dr. Rafael Purtomo Somaji, M.Si.	Editor
5.	Musa Al Kadzim, S.Ag., M.Ag.	Editor
6.	Okyviandi Putra Erlangga, S.EI., M.SEI.	Editor

DAFTAR ISI

VOLUME 2 No. 1 (2024)

Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia **1-8**
(Erlina Dwi Rahmawati, Teguh Hadi Priyono, Endah Kurnia Lestari, Fajar Wahyu Prianto , Duwi Yunitasari, Akhmad Munir)

Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur **9-16**
(Febiyanti Utami, Teguh Hadi Priyono, Nanik Istiyani, Musa Al Kadzim, Okyviandi Putra Erlangga, Suparman, Anifatul Hanim)

Dampak Positif dan Negatif Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) **17-29**
(Adit Abil Faturahman, Ariel Muhammad Syahril Mubarok, Ilham Marta, Roja Fauzi, Muhammad Andi Septian)

Strategi Pengembangan Kawasan Berbasis Kopi di Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember **30-39**
(Nabila Athesa Angie, Aisah Jumiati, Edy Santoso, M. Abd. Nasir, Robby Reza Zulfikri, Siti Komariyah)

Analisis Kemiskinan Jawa Timur **40-48**
(Husniatul Hoiroh, Aisah Jumiati, Teguh Hadi Priyono, Moh. Adenan, Lilis Yuliati, Ciplis Gema Qori'ah)

Pengaruh PDRB, Investasi, dan Aglomerasi terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur **49-57**
(Musyrifah, Edy Santoso, Zainuri, Inayah Swasti Ratih, Abdul Fatah, Bahrina Almas)

Peran Home Industry dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Home Industry Kerupuk Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan) **58-64**
(Lailatul Munawwaroh, Mohammad Saleh, Sebastiana Viphindrartin, Umi Cholifah, Agus Mahardiyanto, Sjafruddin)

Analisis Permintaan Tenaga Kerja pada Sektor Industri di Pulau Jawa Periode Tahun 2012-2022 **65-75**
(Bintang Putri Artha, Fivien Muslihatinningsih, Teguh Hadi Priyono, Riniati, Lusiana Ulfa Hardinawati, Yulia Indrawati, Agus Luthfi)